

**PEMBERDAYAAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PPKS) OLEH TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
KECAMATAN (TKSK) DI KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Oleh :

Syukron Makmun

1601046065

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2020

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 Bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komusikasi

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Syukron Makmun

Nim : 1601046065

Fak. / Jur. : Dakwah dan Komunikasi / Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Judul Skripsi : Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

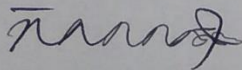
Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Semarang, 24 Agustus 2020

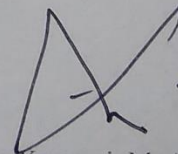
Pembimbing,

Bidang Substansi & Materi

Bidang Metodologi & Tata Tulis



Dr. Agus Riyadi, S. Sos. I., M. Si.
NIP. 19800816 200710 1 003



Drs. Kasmuri, M. Ag
NIP. 19660822 199403 1 004

SKRIPSI


PEMBERDAYAAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) OLEH TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) DI KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Disusun Oleh:
Syukron Makmun
1601046065

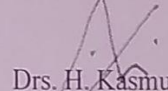
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 7 Oktober 2020 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

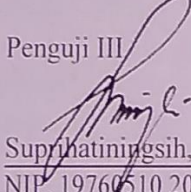
Ketua/Penguji I


Sulistyo, S. Ag., M. Si
NIP. 19700202 199803 1 005

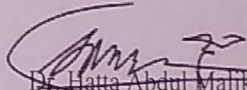
Sekretaris/Penguji II


Drs. H. Kasmuri, M. Ag
NIP. 19660822 199403 1 003

Penguji III

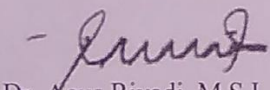

Suprihatiningsih, S. Ag., M. Si
NIP. 19760510 200501 2 001

Penguji IV



Dr. Hatta Abdul Malik, M. Si
NIP. 19800311 200710 1 001

Mengetahui

Pembimbing I


Dr. Agus Riyadi, M.S.I
NIP. 19800816 200710 1 003

Pembimbing II


Drs. H. Kasmuri, M. Ag
NIP. 19660822 199403 1 003

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Kada tanggal 7 Oktober 2020


Darwis Supena, M. Ag
NIP. 19720410 200112 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syukron Makmun

Nim : 1601046065

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang

Saya nyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya serupa yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain.

Semarang, 12 Agustus 2020



Syukron Makmun
NIM.1601046065

KATA PENGANTAR

Alkhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia dan juga di akhirat kelak.

Atas ijin Allah penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana untuk persyaratan kelulusan program Strata 1 (S1) Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi “Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang” dalam hal ini pastinya tidak lepas dari bimbingan, dorongan, dukungan, motivasi, dan do'a dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati yang tulus penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Ilyas Supena, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Sulistio, S. Ag., M. Si. Selaku Ketua Jurusan, dan Bapak Hatta Abdul Malik, S. Sos. I, M. Si., selaku sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

4. Ibu Dr. Kurnia Muhajarah, M.S.I., selaku Wali Dosen
5. Bapak Dr. Agus Riyadi, S. Sos. I, M.S.I., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Kasmuri, M. Ag., selaku dosen pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas ilmu yang diberikan.
7. Segenap staf dan jajaran di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
8. Kedua orang tua Abah Rochmat dan Ibu Djuwariyah yang telah mendukung dan mendo'akan saya selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
9. Bapak Sholikin, SE., S. Pd., selaku TKSK Kecamatan Semarang Tengah sekaligus ketua TKSK se Kota Semarang, yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis, dan yang telah bersabar, tulus, dan ikhlas membantu penulis selama proses penelitian di lapangan.
10. Teman-teman PMI 2016 yang telah memberikan banyak kenangan yang tidak akan terlupakan dalam berjuang bersama menuntut ilmu.
11. Teman-teman tim KKN Reguler 73 tahun 2019 Posko 80
12. Semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah membantu, mendukung, dan mendo'akan penulis selama berproses hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini mendapat balasan dari Allah *Subhanahu Wata'ala*. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu demi kesempurnaan kritik dan saran yang

sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 13 Agustus 2020
Penulis,

Syukron Makmun
NIM.1601046065

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tuaku yaitu abah Rochmat dan ibu Djuwariyah yang selalu memberikan *Support*, dorongan, semangat, motivasi, dan mendo'akan saya selama proses menuntut ilmu mulai dari kecil sampai bisa duduk di bangku perkuliahan ini sampai selesai

Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya untuk beliau berdua.

Aamiin

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Qs. Ar-Ra'du : 11)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Qs. Al-Baqarah : 286)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Qs. Al-Insyiroh : 6)

ABSTRAK

Syukron Makmun (1601046065). “Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang”. Program Strata 1 (S.1) jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN walisongo Semarang 2020.

Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Permasalahan yang di kaji di sini yaitu dari beberapa jenis PPKS hanya satu yaitu focus kepada pemberdayaan fakir miskin sebagai mana angka kemiskinan menempati posisi tertinggi dari pada jenis-jenis PPKS Linnya yang saat ini telah di dampingi TKSK, adapun program pemberdayaan yang telah di dampingi oleh TKSK kepada PPKS fakir miskin yaitu melalui program bansos sembako dan program Kelompok Usaha bersama (KUBE). Tujuan dari program-program pemberdayaan fakir miskin yang di dampingi oleh TKSK Semarang Tengah Kota Semarang supaya masyarakat fakir miskin berdaya dan sejahtera baik secara ekonomi maupun social. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1) bagai mana proses Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang (2) bagaimana hasil dari pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan tehnik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer dan skunder. Sumberdata primer diperoleh dari lapangan dengan stake holder yang bersangkutan dalam pemberdayaan PPKS oleh TKSK di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Sedangkan data skunder diperoleh dari buku, jurnal, dan internet. Keabsahan data dengan metode triangulasi. Tehnik analisis data melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dari Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang tengah Kota Semarang. Bahwa proses dari pemberdayaan yang telah di dampingi oleh TKSK Kepada PPKS fakir miskin di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang yaitu melalui program bansos sembako dan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan proses pendekatan 5P yaitu 1. Pemungkinan, dengan melalui pendataan, penentuan program, dan bentuk program. 2. Penguatan, dengan diberikannya modal dan bantuan untuk menjalankan program, 3. Perlindungan, memberikan perlindungan kepada masyarakat (PPKS fakir miskin) dari segala bentuk penindasan dari kelompok kuat, dengan cara memberikan perlindungan pada program, 4. Penyokongan, dengan diberikannya bimbingan, pendampingan, dan modal usaha serta bantuan, 5. Pemeliharaan, dengan melakukan control serta evaluasi pada masing-masing program. Hasil dari pemberdayaan PPKS oleh TKSK di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, melalui pemberdayaan program bansos sembako dan program KUBE dapat dilihat dari segi social mereka antara individu, masyarakat, hingga kepada pemerintahan, dan segi ekonomi kebutuhan mereka terbantu, tercukupi, mengalami peningkatan pendapatan.

Key word : Pemberdayaan, Kesejahteraan Sosial, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Definisi Konseptual.....	14
3. Sumber dan Jenis Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Uji Keabsahan Data.....	18
6. Teknik Analisis Data.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II : KERANGKA TEORI

A. Pemberdayaan

1. Definisi Pemberdayaan..... 23
2. Tujuan Pemberdayaan..... 25
3. Proses Pemberdayaan..... 27
4. Tahapan Pemberdayaan..... 29
5. Indikator Keberdayaan.....30

B. Kesejahteraan Sosial

1. Definisi Kesejahteraan Sosial..... 31
2. Tujuan dan Fungsi Kesejahteraan Sosial..... 34
3. Pembeangunan Kesejahteraan Sosial.....35

C. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

1. Definisi PPKS..... 36
2. Jenis-jenis PPKS..... 37
3. Penjelasan Jenis-jenis PPKS dan Kriterianya..... 38

D. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

1. Devinisi TKSK..... 50
2. Tujuan TKSK..... 50
3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi TKSK..... 51

BAB III : GAMBARAN UMUM PEMBERDAYAAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) OLEH TENAGA KESEJAHTER AAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) DI KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Kecamatan Semarang Tengah

1. Letak Geografis Kecamatan Semarang Tengah.....53
 - a. Batas Wilayah.....53
 - b. Orbitasi..... 54

c. Luas Daerah / Wilayah.....	54
2. Keadaan Penduduk Kecamatan Semarang Tengah	
a. Keadaan Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin.....	55
b. Keadaan Penduduk Merurut Tingkat Pendidikan.....	56
c. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	56
d. Keadaan Penduduk Menurut Keagamaan.....	57
B. Gambaran Umum TKSK Semarang Tengah	
1. Profil TKSK Semarang Tengah.....	57
2. Ketentuan Umum TKSK	59
3. Tujuan Penetapan TKSK.....	59
4. Kedudukan TKSK.....	59
5. Tugas TKSK.....	59
6. Fungsi TKSK.....	60
C. Proses Pemberdayaa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang	
1. Pendayaan Program.....	62
2. Pendampingan Program.....	64
3. Tujuan Pemberdayaan Program.....	65
4. Pendanaan atau Bantuan Program.....	67
5. Pelaksanaan Program.....	68
6. Dukungan Program.....	70
D. Hasil Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang	
1. Aspek Sosial.....	72
2. Aspek Ekonomi.....	73

BAB IV : ANALILIS DATA

A. Analisis Proses Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang	
1. Proses Pemungkinan.....	80
2. Proses Penguatan.....	81
3. Proses Perlindungan.....	83
4. Proses Penyokongan.....	84
5. Proses Pemeliharaan.....	85
B. Analisis Hasil Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang	
1. Aspek Sosial.....	86
2. Aspek Ekonomi.....	87

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
1. Proses Pemberdayaan.....	90
2. Hasil Pemberdayaan.....	91
B. Saran-Saran.....	92
C. Penutup.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.3 Luas Wilayah Kecamatan Semarang Tengah.....	54
Tabel 3.2 Keadaan Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin.....	55
Tabel 3.3 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	56
Tabel 4.4 Data Agen dan E-Warung di Kecamatan Semarang Tengah.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kesejahteraan sosial, pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan masalah sosial. Fenomena yang disebut sebagai masalah sosial dianggap sebagai kondisi yang dapat menghambat perwujudan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu masalah sosial tidak asing untuk disebutkan sebagai kondisi yang tidak diharapkan, maka dari itu kemunculannya selalu mendorong tindakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Pada hakikatnya, permasalahan kesejahteraan sosial timbul dari dapat atau tidaknya kebutuhan manusia terpenuhi. Permasalahan kesejahteraan sosial ada yang secara nyata berpangkal pada hambatan-hambatan dalam pemenuhan kebutuhan.¹

Mengaju pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial tertentu. Kriteria yang menjadi masalah sosial menurut undang-undang adalah sebagai berikut :²

1. Kemiskinan
2. Ketelantaran
3. Kecacatan
4. Keterpencilan
5. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku
6. Korban bencana

¹. Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Taqwa*, Amzah : Jakarta.
Hlm.112

². UU RI No. 11 Tahun 2009, Bab III, Pasal 5, Ayat 2, *Tentang Kesejahteraan Sosial*

7. Korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Menurut Dora Peyer, masalah kesejahteraan bersumber pada keadaan tidak berdaya. Adapapun ketidak berdayaan meliputi berbagai hal berikut.

1. Keadaan tidak berdaya alamiah (*natural helplessness*), karena saikit, cacat, dan wanita yang mengandung dan melahirkan anak.
2. Keadaan tidak berdaya secara fisik (*physical helplessness*), seperti sakit, cacat, dan wanita yang mengandung dan melahirkan.
3. Keadaan tidak berdaya sosial (*social helplessness*), seperti janda, anak-anak yatim piyatu, dan orang asing.
4. Perbedaan yang lain, terdapat realitas bahwa manusia dalam suatu kelompok atau masyarakat, selalu terdapat siapa yang kuat dan siapa yang lemah, siapa yang pandai dan siapa yang bodoh, dan siapa yang rajin dan siapa yang malas.³

Maka dari itu perlu adanya penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) yaitu usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk investasi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Prioritas utama PKS adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung, khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan. Sasaran PKS yang biasanya dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang antara lain meliputi kemiskinan, disabilitas, anak jalanan, anak yang mengalami perlakuan

³. Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Taqwa*....., 115.

salah (*spause abuse*, anak yang diperdagangkan atau yang dilacurkan, komunitas adat terpencil (KAT), serta kelompok-kelompok lain yang mengalami masalah psikososial, disfungsi sosial atau ketunaan sosial.⁴

Rangkaian permasalahan di atas semua perlu adanya pemberdayaan sebagai proses untuk mensejahterkannya, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah-masalah salah satunya yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik akademisi maupun para praktisi. Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Hal ini bukan karena masalah kemiskinan ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, melainkan karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.⁵

Bahkan masalah kemiskinan nampaknya sudah menjadi gejala umum di seluruh dunia. Bagi Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan dewasa ini menjadi sangat penting karena bank dunia telah menyimpulkan bahwa kemiskinan di negara kita bukan sekedar 10-20% penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut (*extreme poverty*); akan tetapi ada kenyataan lain yang membuktikan bahwa kurang lebih tiga per

⁴. Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, PT Refika Aditama : Bandung , 2005. Hlm. 4-5

⁵. Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Taqwa.....*, 131

lima atau 60% penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan karena itu, mengacu pada paradigma baru.⁶

Masalah kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor yang kompleks, salah satunya ialah faktor mentalitas. Maka dari itu sangat berat untuk mengatasinya, harus membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dengan dukungan sumberdaya manusia yang unggul dan manajemen kerja yang teruji. Al-Qur'an secara tegas dalam menganalogikan perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan itu dengan jalan yang mendaki, adapun ayat tersebut ialah :

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكُّ رَقَبَةٍ ۝ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝
يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَا
صَوًّا بِالصَّبْرِ وَتَوَا صَوًّا بِالْمَرْحَمَةِ ۝

Artinya : *tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar itu ? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. (Qs. Al-Balad : 12-17)⁷*

Maksud dari ayat di atas bahwa Al-Qur'an telah menyebutkan kelompok sosial yang berada di bawah garis kemiskinan, dan mengatasi masalah kemiskinan itu merupakan jalan yang mendaki dan sukar. Kemiskinan yang menjadi akar masalah sosial itu bersumber dari kualitas sumber daya manusia yang rendah, terutama soal mentalitas. Untuk mengatasi fenomena kemiskinan termasuk *jihad fii sabilillah*, yakni jihad

⁶. Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung: 2015. Hlm. 25

⁷. Kemnterian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan penyelenggara penerjemah/pentafsir Al-Qur'an : Jakarta. 1971. Hlm. 1061-1062

di jalan Allah dalam masalah sosial, dan pemberdayaanlah merupakan pilihan yang tepat dan merupakan langkah strategis dalam mengatasi kemiskinan.⁸

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga negara yang belum terpenuhi kebutuhannya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan. Pada umumnya mereka mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, yang dihadapi oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) membutuhkan pemberdayaan tersendiri, karena jangkauan dan populasi yang luas membutuhkan koordinasi dan kemitraan yang dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan untuk meningkatkan fungsi-fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), sehingga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasarnya sehingga menjadi individu, kelompok, dan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan sejahtera.⁹

Pada tahun 2009 sampai sekarang ini kemiskinan (fakir miskin) menduduki prosentase yang tertinggi yaitu 65 % dari beberapa jenis PPKS yang di fasilitasi oleh TKSK di Kecamatan Semarang Tengah Kota

⁸. Asep Usman Ismail, *Kesejahteraan Sosial Perspektif Alqur'an*, Jurnal Vol. 4, 2015. Hlm. 45

⁹. Presiden RI, *Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial*, 2009. Bab. 28. Hlm. 1

Semarang, itupun yang sudah masuk dan sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Maka dari itu TKSK memberikan beberapa program dalam mengatasi masalah kemiskinan yaitu dengan cara memberdayakan masyarakatnya, diantaranya melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan program Bansos sembako. Tujuan dari beberapa program tersebut agar masyarakat bisa mandiri dan bisa mengurangi beban hidupnya untuk mencapai kesejahteraan sosialnya.

Dikarenakan tingginya angka kemiskinan (fakir miskin) yang ditangani oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, maka peneliti tertarik untuk mengkaji proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Semarang Tengah pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya untuk kemiskinan (fakir miskin) melalui program-program pengentasan kemiskinan yang sebagaimana beberapa program tersebut masih berlanjut sampai saat ini dalam penanganan atau dalam pendampingan TKSK di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan diantaranya yaitu :

1. Bagaimana proses pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang?
2. Bagaimana hasil pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan cerminan dari perumusan masalah di atas maka timbullah tujuan penelitian yang harus dikemukakan, adapun tujuannya ialah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.
- b. Untuk mengetahui hasil yang telah dicapai dari Pemberdayaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Kota Semarang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, diantaranya yaitu :

Pertama, Manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini memiliki manfaat sebagai referensi untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pemberdayaan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial bagi peneliti selanjutnya dan khususnya bagi mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

Kedua, Manfaat Praktis. Hasil dari penelitian ini, diharapkan memiliki manfaat bagi pekerja sosial pada umumnya dan Tenaga Kesejahteraan Sosial pada khususnya, sebagai masukan dalam kaitannya

dengan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk lebih efektif dan efisien lagi.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pendukung dalam penulisan ini, penulis melakukan suatu penelusuran terhadap beberapa kajian pustaka dan juga hasil dari penelitian yang berkaitan dengan judul yang saya angkat sebagai bahan acuan, adapun beberapa penelitian tersebut antara lain yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Gafur (2017) dengan skripsinya yang berjudul "*Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam memfasilitasi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat*" penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya yaitu dengan cara observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan mengetahui apa saja faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) belum berperan baik dalam memfasilitasi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat. Terlihat dari mulai dari pendataan dan juga pendampingannya. Hal ini bisa terjadi dikarenakan

keterbatasan kemampuan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menangani masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada *gampoeng-gampoeng* yang ada di Kecamatan Tangan-Tangan juga kurangnya dukungan, bantuan dan pengakuan. Dan juga kerjasama dengan Tenaga Kesejahteraan SosialKecamatan (TKSK) dwngan pihak pemerintah, PKSK wilayah, maupun sesama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghafur lebih menekankan peran TKSK dalam memfasilitasi PMKS dan mengetahui beberapa factor diantaranya yaitu pendukung dan penghambat selama TKSK memfasilitasi PMKS. Sedangkan yang penulis kaji di sini yaitu tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh TKSK kepada PPKS dan mencari tahu bagaimana proses serta hasil dari pemberdayaan yang dilakukan oleh TKSK kepada PPKS lewat program-program khususnya program pemberdayaan kemiskinan (fakir miskin).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ruli Insani Adhitya (2016) dengan skripsinya yang berjudul “ *Efektivitas Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Studi kasus Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Umbulharjo dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pakulaman)*” penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model interaktif. tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui prioritas masalah sosial yang ditangani TKSK, untuk mengetahui tingkat efektivitas peran TKSK di Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Pakulaman, dan juga untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat dari efektifitas TKSK. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus instrumental jamak. Hasil dari penelittian ini yaitu bahwa masalah sosial yang menjadi prioritas program pelayanan sosial TKSK

adalah kemiskinan. Peran TKSK dalam pendampingan sosial masalah kemiskinan sudah cukup efektif.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Ruli Insani Adhitya yaitu lebih menekankan efektifitas peran TKSK, yang tujuannya yaitu untuk mengetahui prioritas permasalahan yang ditangani TKSK di dua Kecamatan, serta mencari tahu factor pendukung serta penghambat efektifitas TKSK dan yang diprioritaskan dari program pelayanan sosial TKSK di sini yaitu kemiskinan. Sedangkan yang penulis kaji di sini yaitu lebih menekankan pada pemberdayaan PPKS khususnya kemiskinan (fakir miskin) dengan beberapa program yang diterapkan TKSK untuk mengatasi pelayanan kesejahteraan sosial di satu Kecamatan. Serta mencari tahu bagai mana proses serta hasil dari pemberdayaan yang dilakukan oleh TKSK kepada PPKS yaitu kemiskinan (fakir miskin).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Yanna Zega (2017) dengan skripsinya yang berjudul “ *Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Miskin dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Humane Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli*” penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan datanya yaitu melalui observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan keberadaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Humane Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dalam upaya meningkatkan pembangunan masyarakat Desa bagi keluarga miskin. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) benar-benar terbentuk pada tahun 2015, namun usaha yang dilakukannya pada saat itu mengalami kendala yang menghambat perkembangan usaha. Modal yang diberikan tidak mencukupi jika usaha terus dijalankan, sedangkan hasil yang didapat hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan

berupa lauk-pauk sehari-hari saja. Dan pada akhirnya salah satu kelompok telah berganti usaha yaitu simpan pinjam yang pada awalnya dikarenakan gagalnya bertani.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitri Yanna Zega yaitu langsung kepada pelayanan kesejahteraan sosialnya, yaitu meningkatkan pembangunan masyarakat desa bagi keluarga miskin melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Sedangkan yang penulis kaji di sini yaitu juga membahas salah satu program pelayanan kesejahteraan sosial yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) akan tetapi yang penulis kaji di sini pembahasannya secara global di tingkat Kecamatan yang dikarenakan langsung di bawah pendampingan TKSK.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nur Ikhsan (2017) dengan skripsinya yang berjudul “ *Efektivitas Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam Pengasuhan Anak Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Imran Kabupaten Gowa* “penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara observasi, wawancara (*interview*), dokumentasi, dan penelusuran referensi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data meliputi tiga tahapan diantaranya yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektifitas peran Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam mengasuh anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Anak Al-Imran Kabupaten Gowa, untuk mengetahui bagaimana aktifitas Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam pengasuhan anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Imran Kabupaten Gowa, dan juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Tenaga

Kesejahteraan Sosial dalam pengasuhan anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Imran Kabupaten Gowa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, untuk meningkatkan efektifitas peran Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam pengasuhan anak terlantar LKSA AL-Imran, maka ada beberapa aktifitas Tenaga Kesejahteraan Sosial agar pengasuhan anak terlantar. *Pertama*, pelayanan yang diberikan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam pengasuhan anak terlantar, meliputi pelayanan fisik, pelayanan psikologi, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan. *Kedua*, peran Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam pengasuhan anak terlantar di LKSA Al-Imran, yaitu peran sebagai pendamping, peran perantara, peran pendidik, dan peran sebagai pencegah. *Ketiga*, pola pengasuhan yang diberikan yang diberikan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam pengasuhan anak terlantar di LKSA Al-Imran, yaitu pola pengasuhan dinamis dan pola pengasuhan situasional. *Keempat* indikator pendukung dalam melakukan pengasuhan terhadap anak terlantar di LKSA Al-Imran, yaitu pengurus LKSA Al-Imran harus kompak, adanya prilaku positif, disiplin serta Tenaga Kesejahteraan Sosial harus kompak.

Perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Nur Ikhsan lebih menekankan pada efektifitas peran Tenaga Kesejahteraan Sosial yang focus mengkaji pada salah satu jenis PPKS yaitu(anak terlantar) di sebuah lembaga, yang sebagaimana seorang Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai pendamping perantara dari lembaga tersebut untuk pelayanan serta pengasuhan anak-anak terlantar. Sedangkan yang dikaji oleh penulis pada penelitian di sini juga membahas dari salah satu jenis PPKS yaitu Kemiskinan (fakir miskin) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk di berdayakan melalui program-program pengentasan kemiskinan.

Kelima, penelitian dari Damis Anggriawan (2010) dengan skripsinya yang berjudul “ *Pola Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di UPT Panti Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Sidoarjo* “penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagai mana pola penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar pada UPT Panti Rehabilitas Sosial di Sidoarjo. Dan juga untuk mengetahui bagaimana keberhasilan penanganan gelandangan, pengemis, dan orang terlantar oleh UPT Panti Rehabilitas Sosial di Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pola penanganan gelandangan, pengemis, dan orang terlantar pada UPT Panti Rehabilitas Sosial di Sidoarjo yaitu melalui beberapa tahap diantaranya yaitu, tahap pendekatan awal, tahap penerimaan tahap pengungkapan dan pemahaman masalah, tahap bimbingan, tahap reisolasi, tahap bimbingan lanjut, program penyaluran dan terminasi. Keberhasilan penanganan gelandangan dan pengemis ini bisa dilihat dari berhasilnya UPT dalam merehabilitasi beberapa mantan binaannya yang sebagian telah berhasil setelah keluar dari UPT. Diantaranya sudah ada yang mampu untuk mandiri dan hidup bermasyarakat.

perbedaan dari penelitian sebelumnya bahwa penelitian dari Damis Anggriawan mengkaji tentang pola penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu gelandangan dan pengemis oleh Unit Pelaksanaan Teknis atau yang di sebut (UPT) panti rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis yang tujuannya yaitu untuk mengetahui keberhasilan dari pola penanganan UPT tersebut. Sedangkan yang dikaji penulis di sini yaitu tentang pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (TKSK) yaitu pada kemiskinan (fakir miskin) oleh

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) melalui program-program pengentasan kemiskinan yang memiliki tujuan untuk mengetahui proses serta hasil pemberdayaan yang dilakukannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang saya gunakan di sini yaitu penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, yaitu peneliti merupakan instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁰ Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif yaitu metode yang mencari fakta juga beberapa permasalahan yang ada di dalam masyarakat yang ada kaitannya dengan sikap, kegiatan, pandangan, dan proses yang sedang berlangsung di lapangan.¹¹

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan konsepsi dan pernyataan yang mengartikan atau memberikan suatu makna dalam konsep istilah tertentu. Definisi konseptual juga merupakan pengembangan secara umum dan menyeluruh dan menyiratkan suatu maksud dan konsep atau istilah tersebut yang bersifat konstruktif, formal, dan mempunyai sebuah pengertian yang abstrak.¹² Supaya pembaca dapat mudah memahami dan menafsirkannya maka peneliti akan memberikan definisi konseptual yang merupakan variabel dari penelitian ini, diantaranya yaitu

¹⁰. Dadang Kusnawa, *Metodologi Penelitian Sosial*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011. Hlm.43

¹¹. Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian Suatu Tujuan Teoritis dan Praktis*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2016. Hlm. 201

¹². Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 1998. Hlm. 36

a. Pemberdayaan

Pemberdayaan yaitu serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan dan sosial.¹³

b. Kesejahteraan Sosial

kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya

c. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial seara memadai dan wajar.

d. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yaitu seorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh kementrian sosial, dinas social daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah Kabupaten/Kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penguasaan di Kecamatan.¹⁴

3. Sumber dan Jenis Data

¹³. Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung : 2005. Hlm. 59

¹⁴. Kemensos RI, *PERMENSOS RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan*, KEMENSOS RI Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial : 2019. Hlm. 5

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam diantaranya yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber data primer, yaitu informasi dari orang pertama atau narasumber. Data skunder adalah data yang diperoleh dari informasi tidak secara langsung dari narasumber, melainkan dari pihak ketiga.

a) Data Primer

Data primer akan diperoleh secara langsung dari subyek penelitian, yaitu diperoleh dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Pengumpulan data primer akan dimulai dengan melakukan observasi tahap awal. Dari hasil observasi selanjutnya dikonfirmasi kepada informan awal. Data primer juga akan diperoleh dari observasi dari informan terkait dengan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kecamatan (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

b) Data Skunder

Data skunder yaitu data yang dikumpulkan dari dokumen, arsip, catatan-catatan, dan foto.¹⁵ Atau sesuatu yang berkaitan dengan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Data skunder juga akan diperoleh dari beberapa studi kepustakaan dengan cara mengkaji beberapa literature dan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga

¹⁵. Eko Gugiaro, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, Suaka Merdeka : Jakarta, 2015. Hlm.

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ialah suatu prosedur yang tersusun secara sistematis dan standar untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.¹⁶ Adapun teknik-teknik yang digunakan untuk pengumpulan data diantaranya yaitu :

a. Observasi

Observasi disebut juga pengamatan dalam setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran.¹⁷ Pada bagian ini peneliti mengamati bagaimana proses Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

b. Wawancara

Wawancara ialah wawancara yang dilakukan oleh dua orang, dimana pewawancara yang memberikan pertanyaan sedangkan yang diwawancarai yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara tersebut.¹⁸

Pada tahap wawancara akan dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui secara langsung dari pihak PPKS setelah mendapatkan pemberdayaan dari TKSK dan tentunya juga melakukan wawancara dengan TKSK. Dan yang akan diwawancarai nantinya yaitu :

a) Bapak Sholikhin (TKSK)

¹⁶. Moh Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1999. Hlm. 221

¹⁷. Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Remaja Rosda Karya : Bandung, 1999. Hlm. 69

¹⁸. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya : Bandung, 2002. Hlm. 135

- b) Bapak Mujianto (Ketua KUBE)
- c) Ibu Kasih (KPM bansos/sembako)
- d) Ibu Erna (Anggota KUBE+Penyalur E-Warung)

Dalam hal ini Peneliti juga melakukan wawancara secara mendalam guna mengetahui sejauh mana perubahan hasil dari proses pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

c. *Dokumentasi*

Dokumentasi ialah pencarian data mengenai beberapa hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan lain sebagainya.¹⁹ Pada metode dokumentasi ini peneliti telah mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan dan proses pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

5. Uji Keabsahan Data

untuk menjamin keakuratan data, maka peneliti melakukan keabsahan data. Adapun nantinya data yang salah akan menghasilkan kesimpulan hasil dari penelitian yang benar. Karena antangan bagi segala jenis penelitian pada akhirnya adalah terwujudnya produksi ilmu pengetahuan yang valid, benar, dan beretika.²⁰

Menurut Mils, Hubberman, dan Hammersley dalam mengartikan keabsahan data atau keberhasilan data dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai sejauh mana suatu situasi subjek penelitian ditentukan

136 ¹⁹. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta : Yogyakarta, 2002. Hlm.

²⁰. Bachri, Bachtiar S. *meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. 2010. Hlm. 54

untuk mewakili fenomena yang diteliti. Silegar dan Shohamy juga menjelaskan bahwa kebenaran data tampak apabila terdapat data yang tepat dan konsisten. Gleshne dan Peskhin juga menegaskan bahwa temuan dari metode atau teknik pengumpulan data akan menyumbangkan, pada kebenaran data dan praktik ini disebut triangulasi. Tjejep mengartikan triangulasi sebagai prosedur peninjauan kebenaran atau kesahan data melalui indeks-indeks intern lain yang dapat memperkuat bukti yang sesuai. Tujuan dari proses triangulasi adalah untuk menentukan hasil penelitian menjadi lebih cepat dan meyakinkan karena bersumber dari berbagai informasi.²¹

Triangulasi dalam kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.²² Maka dari itu peneliti menggunakan metode pengujian kredibilitas sumber dengan cara triangulasi teknik. Tujuan dari penggunaan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu dengan diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis akan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu yang menggambarkan dan melukiskan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fenomena dan hubungan antar fenomena yang diselidiki itu sendiri.

a. *Data Reduction* (Data Reduksi)

²¹. Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data, Edisi Ke-1, Cetakan Ke-4*, Rajawali Pers : Jakarta. 2016. Hlm. 75

²². Tohirin, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta : Bandung. 2015. Hlm. 372

Mereduksi data sama juga merangkum, memilah beberapa hal yang pokok, fokus pada hal yang terpenting yang sesuai dengan tema dan polanya, dan dengan demikian data yang telah direduksi nantinya akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah bagi peneneliti untuk pengumpulan data selanjutnya. Pada bagian ini peneliti merekap hasil wawancara dan memilah-milah sesuai dengan pemberdayaan Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

b. Data Display(Penyajian Data)

Setelah data reduksi maka selanjutnya yaitu menyajikan data. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan demikian maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Pada bagian ini peneliti menyajikan data yang berkaitan dengan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

c. Conclusion Drawing / Verivication (Penarikan Kesimpulan dan Verivikasi)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Maksudnya temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran sebuah objek yang sebelumnya masih samar-samar atau gelap sehingga sesudah diteliti menjadi jelas, hal ini dapat saja berupa hubungan kasual atau interaktif,

hipotesis atau teori.²³ Pada bagian ini penulis memberikan jawaban dari beberapa rumusan masalah penelitian yang lebih jelas yang ada hubungannya dengan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dituliskan penulis pada skripsi di sini adalah :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

2. BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERDAYAAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS), DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK).

Bab ini membahas tentang definisi pemberdayaan secara umum, Kesejahteraan Sosial, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

3. BAB III : Gambaran Umum Pemberdayan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

²³. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2011. Hlm. 252

dalam bab ini akan menerangkan beberapa sub diantaranya, sub pertama yaitu membahas tentang gambaran umum Kecamatan Semarang Tengah, sub kedua membahas tentang profil TKSK, Sub ketiga membahas tentang proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang fokus membahas kemiskinan (fakir miskin) yang sebagaimana yang menonjol dalam pemberdayaan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, dan sub keempat membahas tentang hasil pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

4. BAB IV : Analisis Data

Pada bab ini akan menguraikan dan menganalisis terhadap proses serta hasil penelitian mengenai pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

5. BAB V : Penutup

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian, saran, dan penutup. Kesimpulan akan menyimpulkan ringkasan jawaban dari beberapa rumusan masalah oleh penulis.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan berasal dari kata “*empowerment*” atau daya yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “pemberkuasaan” yang memiliki arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak mampu.²⁴ Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas supaya mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya supaya dapat memenuhi apa yang diinginkan mereka, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaan mereka serta aktifitas sosialnya.²⁵

Secara teoritis pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan atau yang tujuannya untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan individu maupun kelompok lemah dalam masyarakat yang mengalami kemiskinan. Maka dari itu pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin diciptakan oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melakukan tugas-tugas kehidupannya.²⁶

²⁴. Al-Fitri, *Community Development Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2011. Hlm. 22

²⁵. Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press ; Bandung, 2006. Hlm. 85

²⁶. Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Revika Aditama : Bandung, 2014. Hlm. 59-60

Pada dasarnya, pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Pemikiran ini didasarkan pada asumsi bahwa tiada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki daya, akan tetapi masyarakat itu sendiri yang belum menyadari daya yang mereka miliki, maka dari itu daya harus digali dan dikembangkan. Apabila asumsi ini yang berkembang, maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.²⁷

Menurut Totok Mrdikanto, pemberdayaan ialah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan, maksudnya kemampuan dan atau keunggulan bersaing kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan.²⁸

World Bank (2001) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*coice*) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dan lain-lain) yang terbaik dari pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marginal, dan terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, berorganisasi, mempengaruhi, dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi kebaikan kehidupannya.

²⁷. Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Gawa Media : Yogyakarta, 2004. Hlm. 79

²⁸. Totok Mardikanto, Poerwono Soeboto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*, Alfabeta : Bandung, 2013. Hlm. 61

Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti :

- a. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan
- b. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan)
- c. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
- d. Terjaminnya keamanan
- e. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.²⁹

Pada intinya pemberdayaan ialah serangkaian kegiatan kemanusiaan. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangatlah jauh dari konotasi ketergantungan. Dikarenakan hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek yang baru, sehingga sosial yang ada naninya hanya akan dicirikan dengan relasi antar dengan subjek yang lain.³⁰

2. Tujuan Pemberdayaan

Dalam suatu pelaksanaan pasti memiliki suatu tujuan, sebagaimana pemberdayaan yang merupakan suatu implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis kesejahteraan sosial pada individu, kelompok, dan masyarakat. Adapun tujuan dari pemberdayaan tersebut meliputi beberapa hal sebagai berikut :

²⁹. Totok mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*, Alfabeta : Bandung, 2015. Hlm. 28

³⁰. Nur Jannah, *Skripsi Pemberdayaan Mahasiswa dalam Program Kantin Kontainer Dompot Dhuafa Jawa Tengah (Studi pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga, UIN Walisongo Semarang, 2018*. Hlm. 41

- a. Perbaikan pendidikan, maksudnya yaitu pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, akan tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang lebih mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.
- b. Perbaikan aksesibilitas dengan tumbuh kembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, terutama tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.
- c. Perbaikan tindakan dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik diharapkan menjadi tindakan-tindakan yang semakin baik lagi.
- d. Perbaikan kelembagaan dengan perbaikan kegiatan maupun tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- e. Perbaikan usaha perbaikan pendidikan (semangat belajar) perbaikan aksesibilitas kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- f. Perbaikan pendapatan dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
- g. Perbaikan lingkungan perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan

lingkungan sering kali disebabkan oleh kemiskinan/pendapatan yang terbatas.

- h. Perbaiki kehidupan tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- i. Perbaiki masyarakat keadaan kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan (fisik dan lingkungan) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.³¹

3. Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan diartikan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis, yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik itu secara individu maupun kolektif guna untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya yang terdapat dalam individu, kelompok, dan masyarakat, sehingga mampu dalam melakukan transformasi sosial.³²

Partisipasi adalah salah satu unsur yang terpenting dalam menjamin keberhasilan usaha dalam proses pemberdayaan. Partisipasi merupakan pihak-pihak yang terlibat dan ikut serta dalam suatu proses pemberdayaan yang sedang berlangsung. Selain itu ada strategi yang dapat dilakukan dalam proses pemberdayaan adalah penyadaran. Dikarenakan dalam proses pemberdayaan diperlukan kesadaran masyarakat terhadap minat dan kepentingan pada program pemberdayaan.

³¹. Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*, Alfabeta : Bandung, 2013. Hlm. 111-112

³². M. Padangaran Ayub, *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, Unhalu Press : Kendari, 2011. Hlm.31

Ada beberapa pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan menurut Edi Suharto yang dikutip oleh Al-Fitri melalui penerapan serta pendekatan yang disingkat 5P diantaranya yaitu :

33

1. Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara optimal. Maka dari itu pemberdayaan harus membebaskan sesuatu yang terhambat dari diri masyarakat tersebut.
2. Penguatan, yaitu adanya penguatan dan kemampuan yang diberikan kepada masyarakat sehingga mampu memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya, sehingga masyarakat mampu berkembang dan percaya diri dengan segenap kemampuannya yang mana akan menunjang kemandirian masyarakat.
3. Perlindungan, yaitu adanya perlindungan terutama kelompok yang lemah dari sekelompok yang kuat dan menghindari persaingan yang tidak seimbang. Hal ini akan mencegah terjadinya penindasan dan eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.
4. Penyokongan, yaitu adanya *support* atau dukungan supaya masyarakat mampu melakukan peranan dan tugasnya. Jadi pada intinya pemberdayaan mampu memberikan dukungan kepada masyarakat supaya mereka mampu menjalankan tugasnya dan tidak merasa terpinggirkan.
5. Pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi sehingga setiap orang memiliki kesempatan berusaha. Istilah pemberdayaan sendiri

³³. Alfitri, *Community Development Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2011. Hlm. 26

dipakai untuk menggambarkan individu seseorang seperti yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan setiap aktifitas masing-masing individu memiliki kontrol disemua aspek kehidupan sehari-hari yang bertujuan sebagai bukti keberadaan dan keberdayaannya.

4. Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan dapat dilihat dari setiap manusia dan masyarakat yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Sehingga pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk membangun potensi dengan memberi motivasi serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya. Berikut ini ada beberapa tahapan yang dilalui untuk sampai pada kondisi di mana masyarakat berdaya untuk mengembangkan dirinya sendiri, tahapan tersebut diantaranya ialah :³⁴

- a. Tahap penyadaran, yaitu tahap di mana masyarakat diberi pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik.
- b. Tahap pengkapasitasan (*capacity building*), atau memampukan (*enabling*), yaitu dimana pada tahap tersebut masyarakat diberi pengetahuan, ketrampilan, fasilitas, organisasi, dan sistem nilai atau aturan main.
- c. Tahap pendayaan, (*empowerment*), yaitu di mana tahap tersebut masyarakat diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang telah mereka miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri.

³⁴. Alfitri, *Community Development Teori dan Aplikasi*,27

5. Indikator Keberdayaan

Dalam pemberdayaan diperlukan juga indicator keberdayaan yang tujuannya untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam upaya pemberdayaan itu sendiri, apakah seorang itu berdaya apa tidak. Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indicator pemberdayaan yang disebut *empowerment index* diantaranya yaitu :

- a. Kebebasan mobilitas yaitu kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, tempat ibadah, silaturahmi ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil : kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak, dan bumbu) kebutuhan pribadi (sabun mandi, rokok, bedak). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia mampu membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, lebih jika ia dapat membelikan barang-barang dengan menggunakan uangnya sendiri.
- c. Kemampuan memilih komoditas besar ; kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier. Seperti lemari pakaian, Tv, radio, Koran, majalah, pakaian keluarga yang membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya terlebih dahulu jika dapat membeli barang-barang dengan menggunakan uangnya sendiri.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga. Mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga. Misalnya

- mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.
- e. Kebebasan relative dan dominasi keluarga. Menanyai responden apakah ada seseorang yang mengambiliuang, taah, perluasan tapa ijin, melarang mempunyai anak, melarang bekerja di luar rumah.
 - f. Kesadaran hokum dan politik, mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hokum-hukum waris
 - g. Keterlibatan kampanye dalam protes-protes, seseorang dianggap berdaya jika pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain dalam melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil , penyalah gunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
 - h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia mampu memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.³⁵

B. Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” ini mengandung dari bahasa sanskreta yaitu “catera” yang berarti payung. Maksud dari konteks ini adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga

³⁵. Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, PT Refika Aditama : Bandung, 2014. Hlm. 63-66

supaya hidupnya aman dan tentram, baik dalam lahir maupun batin. Sedangkan sosial berasal dari kata “socius” yang berarti kawan, teman, dan kerja sama. Orang yang sosial adalah orang yang dapat relasi dengan orang lain dan lingkungannya dengan baik. Jadi kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya dengan baik.

Banyak pengertian kesejahteraan sosial yang sudah dirumuskan, baik oleh para pakar, PBB, dan badan-badan di bawahnya diantaranya yaitu :³⁶

a. friedlander

kesejahteraan sosial adalah system yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan dengan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

b. PBB

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka.

c. UU NO.6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1

Kesejahteraan sosial adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial, materil ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan

³⁶. Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, PT Refika Aditama : Bandung. 2012. Hlm. 10

usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.³⁷

d. UU NO. 11 Tahun 2009

UU Nomor 6 Tahun 1974 kemudian diganti dengan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.³⁸

Dengan demikian, kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relative berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Pada intinya kesejahteraan mencakup tiga konsepsi diantaranya yaitu :

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial.
3. Aktifitas, yaitu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti sandang,

³⁷. UU RI No.6 Tahun 1974, Bab II, Pasal 2, Ayat 1, *Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial*

³⁸. UU RI No. 11 Tahun 2009, Bab I, Pasal 1, Ayat 1, *Tentang Kesejahteraan Sosial*

pangan, papan, pendidikan, serta perawatan kesehatan. Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (*social protection*) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh dari aktifitas kesejahteraan sosial.³⁹

Menurut Fadil, kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan. Dalam hal tersebut juga meliputi relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraan selaras mungkin dengan kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.⁴⁰

2. Tujuan dan Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial suatu sistem memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, dalam arti tercapainya kehidupan pokok yakni kebutuhan sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang baik dengan lingkungannya.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri di masyarakat manapun pada lingkungannya, misalnya menggali beberapa sumber daya, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

³⁹. Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung : 2014. Hlm. 3

⁴⁰. M. Fadil Nurdin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Angkasa : Bandung, 1990. Hlm. 10

Fungsi kesejahteraan sosial pada dasarnya bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan sosial ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif terhadap pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁴¹

Ada beberapa fungsi dalam berbagai usaha kesejahteraan sosial diantaranya yaitu :

- a. Fungsi pemulihan (*rehabilitative*) yang dimaksudkan untuk meniadakan hambatan-hambatan yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak dapat berfungsi dan berperan sebagai anggota masyarakat.
- b. Fungsi pencegahan (*preventive*) yang dimaksudkan sebagai langkah untuk mencegah supaya tidak terjadi masalah kesejahteraan sosial.
- c. Fungsi pengembangan (*developmental*) yang dimaksud untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas seseorang atau sekelompok orang agar dapat memenuhi kehidupan yang lebih baik.
- d. Fungsi penunjang (*supportive*) berfungsi untuk menunjang program dan fungsi lain agar dapat berjalan lebih baik.⁴²

3. Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk investasi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan

⁴¹. M. Fadil Nurdin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*,.....34

⁴². Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2008. Hlm. 361-362

mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 1997). Tujuan Pembangunan Kesejahteraan sosial (PKS) adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup :

- a. Meningkatkan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
- b. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
- c. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Ciri utama PKS adalah komprehensif dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan (*beneficiaries*) sebagai manusia, baik secara individu maupun kolektivitas, yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosiokulturalnya. Objek Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah seluruh masyarakat dari berbagai golongan dan kelas sosial. Namun prioritas utama PKS adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*), khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan.⁴³

C. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

1. Pengertian PPKS

^{43.} ^{43.} Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*..... Hlm. 5

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau yang disingkat PPKS ialah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.⁴⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) diketahui bahwa terjadi penambahan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang mana jika tahun sebelumnya jumlah PPKS hanya berjumlah 22 jenis, saat ini bertambah menjadi 26 jenis PPKS, adapun empat jenis PPKS yang baru dicantumkan dalam Permensos RI tersebut meliputi kategori anak dengan kedisabilitas, pemulung, kelompok, minoritas, serta korban trafficking.

2. Jenis-Jenis PPKS

Berikut ini adalah 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani oleh dinas sosial :

- a. Anak balita terlantar
- b. Anak terlantar
- c. Anak yang berhadapan dengan hukum
- d. Anak jalanan
- e. Anak dengan kedisabilitas (ADK)
- f. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
- g. Anak yang memerlukan perlindungan khusus

⁴⁴. PID & Media Center Dinsos Riau

- h. Lanjut usia terlantar
- i. Penyandang disabilitas
- j. Tuna susila
- k. Gelandangan
- l. Pengemis
- m. Pemulung
- n. Kelompok minoritas
- o. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
- p. Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)
- q. Korban penyalahgunaan NAPZA
- r. Korban trafficking
- s. Korban tindakan kekerasan
- t. Pekerja migran bermasalah sosial
- u. Korban bencana alam
- v. Korban bencana sosial
- w. Perempuan rawan sosial ekonomi
- x. Fakir miskin
- y. Keluarga bermasalah sosial psikologi
- z. Komunitas adat terpencil

3. Penjelasan Jenis-jenis PPKS dan Kriterianya

Maksud dari jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di atas penjelasan dan kriterianya ialah sebagai berikut :⁴⁵

- a. Anak belita terlantar, yaitu seorang anak berusia 5 tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di keluarga tidak mampu oleh orang tua / keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan

⁴⁵. Kemensos RI

perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria :

- 1) Anak terlantar / tanpa asuhan yang baik
 - 2) Berasal dari keluarga sangat miskin / miskin
 - 3) Kehilangan hak asuh orang tua / keluarga
 - 4) Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua / keluarga
 - 5) Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalah gunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan
 - 6) Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang
- b. Anak terlantar, yaitu seorang anak usia 6 sampai 18 tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua / keluarga atau anak yang kehilangan hak asuhnya dari orang tua / keluarga.

Kriteria :

- 1) Berasal dari keluarga fakir miskin
 - 2) Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya
 - 3) Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
- c. Anak yang berhadapan dengan hukum, ialah seorang anak yang berusia 12 tetapi sebelum mencapai usia 18 tahun, meliputi anak yang disangka, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria :

- 1) Anak yang disangka
- 2) Anak yang didakwa

- 3) Anak yang dijatuhi pidana
- d. Anak jalanan, ialah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

- 1) Menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun di tempat-tempat umum
 - 2) Mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum
- e. Anak dengan kecacatan (ADK), ialah seorang anak yang usianya belum mencapai 18 tahun yang mengalami kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani, maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

- 1) Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, runtu dan wicara
 - 2) Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
 - 3) Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
 - 4) Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
- f. Anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, ialah anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya,

sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.

kriteria :

- 1) Anak (laki-laki/perempuan) di bawah usia 18 tahun
 - 2) Sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan indakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis
 - 3) Pernah dianiaya dan/atau diperkosa
 - 4) Dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)
- g. Anak yang memerlukan perlindungan khusus, ialah anak yang berusia 6 sampai 18 tahun dalam situasi darurat, dalam kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kriteria :

- 1) Berusia 6 tsampai 18 tahun
- 2) Dalam situasi darurat dan dan berada dalam lingkungan yang buruk / dekriminasi
- 3) Korban perdagangan manusia
- 4) Korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan seksual
- 5) Korban eksploiasi, ekonomi atau seksual
- 6) Dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil

- 7) Menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza)
- 8) Terinfeksi HIV / AIDS
- h. Lanjut usia terlantar, ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena factor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kriteria :

- 1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan
- 2) Terlantar secara psikis, dan sosial
- i. Penyandang disabilitas, ialah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kriteria :

- 1) Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktivitas sehari-hari
- 2) Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari
- 3) Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai
- 4) Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
- 5) Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
- 6) Penyandang disabilitas fisik dan mental / disabilitas gada
- j. Tuna susila, ialah seorang yang melakukan hubungan hubungan dengan sesame atau lawan jenis secara berulang-

ulang dan bergantian di luar pernikahan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.

Kriteria :

- 1) menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotik.
 - 2) Memperoleh imbalan uang, materi atau jasa
- k. Gelandangan, ialah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai mata pencarian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria :

- 1) Tanpa kartu penduduk (KTP)
 - 2) Tanpa tempat tinggal yang pasti / tetap
 - 3) Tanpa penghasilan yang tetap
 - 4) Tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya
- l. Pengemis, ialah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria :

- 1) Mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain
- 2) Berpakaian kumuh dan compang-camping
- 3) Berada di tempat-tempat ramai / strategis
- 4) Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain

m. Pemulung, ialah orang-orang yang melakukan pekerja-
an dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-
barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman
pendudukan, perkotaan, dan/atau pasar-pasar yang
bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga
memiliki nilai ekonomis.

Kriteria :

- 1) Tidak mempunyai pekerjaan tetap
- 2) Mengumpulkan barang bekas

n. Kelompok minoritas, ialah kelompok yang mengalami
gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan
marginalisasi yang diterimanya, sehingga karena
keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami
masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Kriteria :

- 1) Gangguan keberfungsian sosial
- 2) Diskriminasi
- 3) Marginalisasi
- 4) Berperilaku seks menyimpang

o. Bekas warga binaan kelembagaan pemasyarakatan
(BWBLP), ialah seseorang yang telah selesai masa
pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan
mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali
dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan
untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan
kehidupannya secara normal.

Kriteria :

- 1) Seseorang (laki-laki / perempuan) berusia di atas 18
tahun

- 2) Telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana
 - 3) Kurang diterima / dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat
 - 4) Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap
 - 5) Berperan sebagai kepala keluarga / pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
- p. Orang dengan HIV / AIDS (ODHA), ialah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV / AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria :

- 1) Seseorang (laki-laki / perempuan) berusia 18 tahun ke atas
 - 2) Telah terinfeksi HIV / AIDS
- q. Korban penyalahgunaan NAPZA, ialah seseorang yang menggunakan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di luar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Kriteria :

- 1) Seseorang (laki-laki / perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkotika, dan zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba
- 2) Secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang
- 3) Tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya

r. Korban trafficking, ialah seseorang yang mengalamipenderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Kriteria :

- 1) Mengalami tindak kekerasan
- 2) Mengalami eksploitasi seksual
- 3) Mengalami penelantaran
- 4) Mengalami pengusiran (deportasi)
- 5) Keidak mampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

s. Korban indak kekerasan, ialah orang baik individu, keluarga, kelompok, maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami indak kekerasan, baik sebagai perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- 1) mengalami perlakuan salah
- 2) mengalami penelantaran
- 3) mengalami tindakan eksploitasi
- 4) mengalami perlakuan diskriminasi

t. pekerja migran bermasalah sosial (PMBS). Ialah pekerja migran dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam benuk tindakan kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidak mampuan

menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- 1) Pekerja migran domestik
 - 2) Pekerja migran lintas negara
 - 3) Eks pekerja migran domestik dan lintas negara
 - 4) Eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia
 - 5) Pekerja migran tidak berdokumen (undocument)
 - 6) Pekerja migran miskin
 - 7) Mengalami masalah sosial dalam bentuk indak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidak mampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu dan mengalami trafficking.
- u. Korban bencana alam, ialah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang di sebabkan oleh alam, anatara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Kriteria :

- 1) Korban terluka dan meninggal
- 2) Seseorang atau kelompok yang mengalami kerugian harta benda
- 3) Seseorang atau kelompok yang mengalami dampak psikologis

- 4) Seseorang atau kelompok yang terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
- v. Korban bencana sosial, ialah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Kriteria :

- 1) Korban jiwa manusia
 - 2) Kerugian harta benda
 - 3) Dampak psikologis
- w. Perempuan rawan sosial ekonomi, ialah seorang perempuan dewasa yang sudah menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria :

- 1) Perempuan berusia 18 sampai 59 tahun
 - 2) Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan
 - 3) Menjadi pencari nafkah utama keluarga
 - 4) Penghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup yang layak.
- x. Fakir miskin, ialah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kriteria :

- 1) Tidak mempunyai sumber mata pencarian

- 2) Mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- y. Keluarga bermasalah sosial psikolog, ialah keluarga yang hubungan antara keluarganya terutama antara suami istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Kriteria :

- 1) Suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi
 - 2) Suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga
 - 3) Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul / berkomunikasi
 - 4) Kebutuhan anak baik jasmani, rohani, maupun sosial kurang terpenuhi
- z. Komunitas adat terpencil, ialah sekelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Kriteria :

- 1) Bentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen
- 2) Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan
- 3) Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau
- 4) Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem
- 5) Peralatan dan teknologinya sederhana

- 6) Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumberdaya alam setempat relatif tinggi
- 7) Terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

D. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

1. Pengertian Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, disebutkan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat menjadi KSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh kementerian sosial dan/atau dinas/instansi sosial Provinsi, dinas/instansi sosial Kabupaten/Kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu menyelenggarakan kesejahteraan sesuai dengan wilayah penguasaan di Kecamatan.

2. Tujuan TKSK

Tujuan dari pembentukan dan penugasan TKSK meliputi :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan
- b. Terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan
- c. Terjadinya kerjasama dengan sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan program-program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan.

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi TKSK

1. Kedudukan

TKSK berkedudukan di tingkat Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja di satu wilayah Kecamatan yang meliputi desa atau kelurahan.

2. Tugas

Secara umum, tugas TKSK di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. Melakukan pemetaan sosial berupa pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- b. Melaksanakan dan/atau membantu menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh kementerian sosial, dinas/instansi sosial Provinsi, dinas/instansi Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.
- c. Melakukan koordinasi dengan PSKS dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- d. Melakukan sinergi, integrasi, dan sinkronasi dengan camat dan/atau perangkat organisasi di bawahnya antara penyelenggara kesejahteraan sosial dan penyelenggara tugas umum pemerintahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

- e. Kelakulan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak
- f. Mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3. Fungsi TKSK

Fungsi TKSK di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. Koordinator, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi koordinasi yang berkaitan dengan kerja sama, sinergi, integrasi, dan sinkronasi dengan PKSK, sumberdaya manusia kesejahteraan sosial dan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah Kecamatan tempat penugasan.
- b. Administator, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi administrasi yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah Kecamatan tempat penugasan.
- c. Fasiitator, yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi fasilitasi dan/atau pendampingan sosial secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah Kecamatan tempat penugasan.⁴⁶

⁴⁶. Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Panduan TKSK Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Lngsung Sementara Masyarakat (BLSM)*, KEMENSOS RI, 2013. Hlm. 26

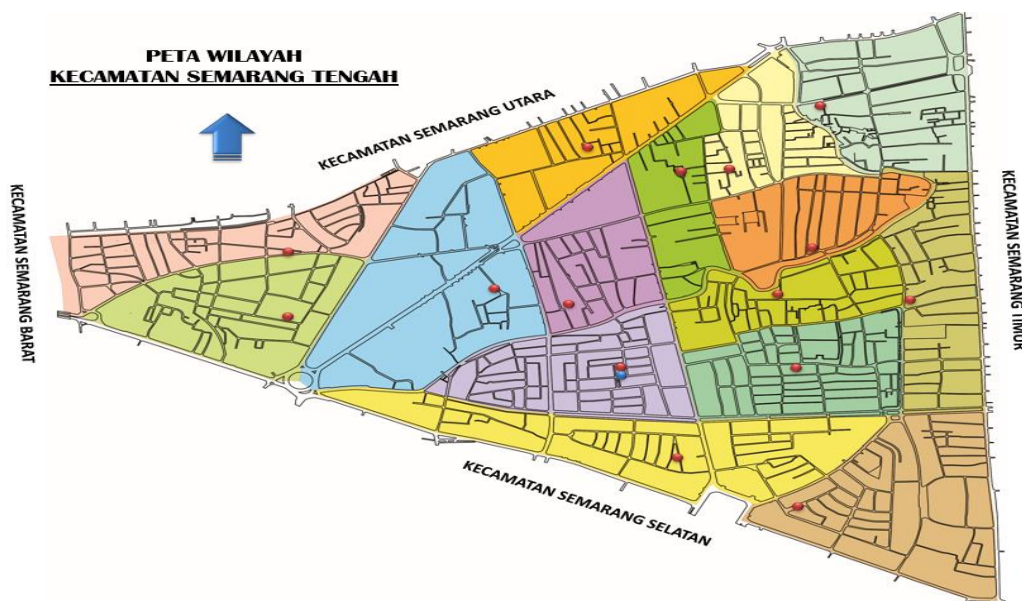
BAB III

GAMBARAN UMUM PEMBERDAYAAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) OLEH TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) DI KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Kecamatan Semarang Tengah

Gambar 3.1

Peta Wilayah Kecamatan Semarang Tengah



1. Letak Geografis⁴⁷

kecamatan Semarang Tengah merupakan bagian wilayah yang berada di Kota Semarang, yang tepatnya terletak pada $6^{\circ}58'52.41''$ LS dan $110^{\circ}25'12.98''$ BT dengan batasan-batasan sebagai berikut :

a. Batas wilayah

Sebelah Utara : Kecamatan Semarang Utara

Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Timur

⁴⁷. <https://kecsmtengah.semarangkota.go.id> diakses pada 23 Juni 2020

Sebelah Selatan: Kecamatan Semarang Selatan

Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Barat

b. Orbitasi

Jarak dari pusat pemerintahan Kota Semarang +- 0,5 Km sedangkan dengan pusat ibu kota Profinsi Jawa Tengah +- 1,5 Km. Dengan kantor pusat pemerintahan terletak di Kelurahan Miroto. Jarak Kelurahan terjauh dengan kantor Kecamatan Semarang Tengah +- 2,5 Km yakni Kelurahan Purwodinatan.

c. Luas daerah / wilayah

Kecamatan Semarang Tengah mempunyai luas wilayah 605,64 ha yang terbagi dalam 15 Kelurahan diantaranya yaitu :

Tabel 3.1
Luwas Wilayah Kecamatan Semarang Tengah
Dari Masing-masing Kelurahan

No	Nama Kelurahan	Luas Wilayah
1	Miroto	33,60 ha
2	Brumbungan	30,39 ha
3	Jagalan	27,03 ha
4	Kranggan	25,25 ha
5	Gabahan	20,52 ha
6	Kembangsari	46,60 ha
7	Sekayu	58,88 ha
8	Pandansari	46,60 ha
9	Bangunharjo	25,10 ha
10	Kauman	28,63 ha
11	Purwodinatan	49,24 ha

12	Karangkidul	83,54 ha
13	Pekunden	79,99 ha
14	Pendirikan Kidul	30,33 ha
15	Pendirikan Lor	36,79 ha

2. Keadaan Penduduk Kecamatan Semarang Tengah⁴⁸

a. Keadaan Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin

Table 3.2
Keadaan Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin

No	Nama Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		L	P	Jumlah L + P
1	Miroto	2.545	2.727	5.272
2	Brumbungan	2.150	2.376	4.526
3	Jagalan	3.415	2.842	6.257
4	Kranggan	2.933	3.145	6.078
5	Gabahan	3.449	3.967	7.416
6	Kembangsari	1.943	1.945	3.888
7	Sekayu	1.945	1.928	3.873
8	Pandansari	1.632	1.746	3.378
9	Bangunharjo	1.565	1.593	3.158
10	Kauman	1.929	1.974	3.903
11	Purwodinatan	2.281	2.372	4.653
12	Karangkidul	2.260	2.529	4.789
13	Pekunden	2.024	2.053	4.077
14	Pendirikankidul	1.962	1.932	3.894

⁴⁸. Profile Kecamatan Semarang Tengah 2017, Hlm. 4-7

15	Pendirikanlor	2.948	3.122	6.070
	Jumlah	34.981	36.251	71.232

b. Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan

Tamat Perguruan Tinggi	: 2.939
Tamat Akademik	: 2.874
Tamat SLTA	: 13.951
Tamat SLTP	: 13.408
Tamat SD	: 15.116
Tidak Tamat SD	: 6.031
Belum Tamat SD	: 7.444
Tidak Sekolah	: 4.323

c. Keadaan penduduk menurut pencaharian

Tabel 3.3

Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pengusaha sedang / besar	3.642
2	Pengrajin / industry kecil	711
3	Buruh Industri	29.857
4	Buruh bangunan	16.167
5	Pedagang	11.006
6	Pengangkutan	3.006
7	PNS	15.254
8	ABRI	968
9	Pensiunan (ABRI / PNS)	7.016
10	Lain-lain	2.358

d. Keadaan penduduk menurut keagamaan

Islam : 37.970

Katholik : 6.887

Protestan : 6.741

Hindu : 445

Budha : 2.881

B. Gambaran Umum TKSK

1. Profil TKSK Semarang Tengah⁴⁹

PROFIL TKSK SEMARANG TENGAH

Gambar 3.2

Foto TKSK Kecamatan Semarang Tengah



Nama : SHOLIKIN, SE, S. Pd

Tempat dan Tanggal Lahir : Grobogan, 10 Oktober 1967

Alamat Rumah : Kp. Grobogan No. 48 Semarang

Alamat Tempat Tinggal : Blok D X / 2 Perumahan Semarang

Indah

⁴⁹. Sholikin, *Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan TKSK Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tri Wulan IV*, 2019

Alamat Kantor : Jalan Taman Seteran Barat No. 1
Semarang, Telp. (024) 3552694

Agama : Islam

Pendidikan : S1 Ekonomi dan S1 Pendidikan

Pengalaman Organisasi :

1. Ketua FKKT Kec. Smg Tengah
2. Wkl. Ketua DP. Ranting GOPTKI Semarang
3. Penasehat FPSM Kec. Semarang Tengah
4. Ketua Yay. Penyelenggara TK Karangtaruna
5. Anggota MPKT Kota Semarang
6. Ket.Panwascam Tahun 2009,2013, 2014,2015
7. Anggota PPK Pilgub 2018 dan
8. Anggota PPK Pemilu 2019
9. Ketua PPK Pilwakot 2020

Pendampingan :

1. Anak jalanan
2. KUBE
3. JLU
4. Psikotik
5. Pendampingan BPNT
6. Pendampingan Kartu Jawa Tengah Sejahtera

Alamat email : tskxsemarangtengah@yahoo.co.id
Tskxsemarangtengah@gmail.com

2. Ketentuan Umum TKSK⁵⁰

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah Provinsi, dan/ atau Dinas Sosial daerah Kabupaten / Kota untuk membantu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di Kecamatan

3. Tujuan Penetapan TKSK

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan
- b. Melaksanakan koordinasi dengan potensi dan sumber kesejahteraan lainnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan
- c. Meningkatkan kerjasama dan sinergi antara program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya di tingkat Kecamatan

4. Kedudukan TKSK

- a. TKSK berkedudukan di Kecamatan dan setiap kecamatan hanya terdapat 1(satu) orang TKSK
- b. TKSK mempunyai wilayah kerja di 1 (satu) Kecamatan yang meliputi Desa atau Kelurahan atau nama lainnya.

5. Tugas TKSK

⁵⁰. Kemensos RI, *PERMENSOS RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan*, KEMENSOS RI Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial : 2019. Hlm. 5-10

- a. Tugas TKSK membantu Kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah Provinsi, dan Dinas Sosial daerah Kabupaten / Kota dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - b. Tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada poin (a) dilaksanakan dengan atau tanpa imbalan
 - c. Tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada poin (a) dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah Provinsi, dan Dinas Sosial daerah Kabupaten / Kota
 - d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (a) TKSK berkoordinasi dengan Kecamatan
 - e. Selain tugas sebagaimana yang dimaksud pada poin (a) TKSK dapat bekerja sama dan menyinergikan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya.
6. Fungsi TKSK

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial TKSK memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Koordinasi

- 1) Koordinasi, merupakan sinkronisasi dan harmonisasi dengan dengan Dinas Sosial daerah Kabupaten atau Kota, Perangkat Kecamatan, tokoh masyarakat lain dan/atau PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- 2) Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada poin di atas [1)] dilaksanakan dalam bentuk :
 - a) Saling memberikan informasi
 - b) Menyamakan persepsi
 - c) Membangun kesepakatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

b. Fasilitasi

- 1) Fasilitasi, merupakan upaya untuk membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan
- 2) Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada poin di atas [1]) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a) Pendampingan social
 - b) Bimbingan social
 - c) Kemitraan
 - d) Rujukan
- 3) Bentuk fasilitasi sebagaimana yang dimaksud di atas pada poin [2]), dilaksanakan untuk meningkatkan keberfungsian social.

c. Administrasi

- 1) Yang dimaksud administrasi di sini, merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 2) Administrasi sebagaimana yang dimaksud di atas pada angka [1]) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a) Pemetaan social
 - b) Pencatatan
 - c) Pelaporan

C. Proses Pmeberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) mempunyai upaya untuk memberdayakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya kepada fakir miskin melalui beberapa program

pemberdayaan untuk mensejahterakan mereka yang perlu disejahterakan dalam segi ekonomi dan socialnya. PPKS memerlukan dorongan, motivasi, pendampingan dalam menjalankan pemberdayaan yang diberikan oleh suatu lembaga dari pemerintahan. Supaya mereka dapat memiliki motivasi juga semangat untuk menjalankan kehidupan secara mandiri dan sejahtera.

Melihat kondisi para fakir miskin yang ada di Kecamatan Semarang Tengah ini TKSK memang prihatin pada kondisi mereka yang memang tidak berdaya, maka dari itu TKSK mengusahakan dan memberikan suatu pelayanan untuk mereka dalam pemberdayaan supaya mereka tidak terus bergantung kepada orang lain dan supaya mereka bisa mandiri dan sejahtera dalam menjalani kehidupan yang layak seperti pada umumnya. Oleh karena itu TKSK memberikan beberapa program pemberdayaan serta mensejahterakan mereka melalui program Bansos (Sembako) dan program KUBE.

Adapun gambaran umum proses pemberdayaan PPKS oleh TKSK di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang melalui program bansos sembako dan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ialah sebagai berikut :

1. Pendayaan Program

Pemberdayaan PPKS fakir miskin yang didampingi oleh TKSK di Kecamatan Semarang Tengah yaitu melalui beberapa program, sebagaimana program-program tersebut adalah program yang dapat menunjang, memandirikan, dan mensejahterakan fakir miskin diantaranya yaitu program bantuan secara langsung bansos sembako dan program kemandirian kelompok yaitu program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Wawancara dengan bapak Sholikin (TKSK Semarang Tengah sekaligus koordinator TKSK se Kota Semarang) pemberdayaan PPKS yang dilakukan TKSK di Kecamatan Semarang Tengah ini yaitu lebih condong kepada pemberdayaan kaum fakir miskin, yang di mana kebanyakan yang di damping TKSK adalah fakir miskin. Pemberdayaan fakir miskin di Kecamatan Semarang Tengah yang dalam pendampingan TKSK itu melalui beberapa Program yaitu melalui program Bansos (sembako) yaitu berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang di mana bantuan tersebut di berikan secara langsung kepada KPM dalam satu bulan sekali dan bantuan tersebut berupa barang sembako bukan berupa uang. Program yang satunya yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang di mana program tersebut merupakan program yang diberikan langsung melalui Dinas Sosial Provinsi untuk memberdayakan fakir miskin yang dalam pendampingan TKSK. Program KUBE ini merupakan salah satu program kesejahteraan social untuk penghapusan kemiskinan, melalui program ini masyarakat miskin mendapatkan fasilitasi untuk digunakan dalam pengembangan sebuah usaha dalam jangka panjang, dalam arti bukan bantuan yang digunakan sekali habis. Maka dari itu dengan pemberdayaan mmelalui program ini masyarakat miskin bisa saling bahu membahu dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatannya untuk kebutuhan sehari-hari.⁵¹

“untuk pemberdayaan di sini TKSK itu mendampingi warga atau masyarakat miskin di mana supaya dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri secara maksimal, salah satunya diberdayakan dengan memberikan Bansos dan program KUBE dibagian mandiri istilahnya supaya dia itu mandiri, memberdayakan mereka yang selama ini kekurangan kita dayakan melalui Bansos dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

⁵¹. Wawancara dengan Bapak Sholikin (TKSK Kecamatan Semarang Tengah sekaligus Koordinator TKSK se Kota Semarang), 22 Juni 2020

“untuk Bansos saat ini namanya sembako, dulu sebelumnya itu namanya raskin, diubah lagi menjadi rastra, diubah lagi menjadi BPNT, dan yang terakhir ini berubah menjadi sembako itu istilahnya. Itu yang berhak mendapatkannya adalah warga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan itupun datanya KPM bansos dari Kemensos yaitu yang menentukan dari Jakarta. Kemudian didampingi di lapangan oleh TKSK,

“Untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) usulan dari bawah (Kelurahan) atas permintaan Dinas Sosial Provinsi, persyaratannya adalah penerima harus dari keluarga miskin yang terdaftar di DTKS, dan pemberdayaan itu ada di dua Kelurahan yaitu di Brumbungan dan Pandansari, dan dimasing-masing Kelurahan tersebut ada 5 kelompok KUBE dan masing-masing kelompok terdapat 5 anggota, untuk usahanya itu sama kebetulan di Semarang Tengah berupa gas LPG 3 Kg, per kelompoknya mendapatkan 57 tabung gas LPG + isinya sebagai modal awal untuk di jual atau dikembangkan.”

2. Pendampingan Program

Disini TKSK termasuk memiliki suatu peran ditengah-tengah mereka sebagai pendamping, dalam pendampingannya TKSK memberikan pengarahan, penyuluhan, dukungan, serta motivasi kepada setiap individu dan kelompok dari mereka supaya mereka memiliki rasa percaya diri bahwa mereka memiliki kualitas sebagai sumberdaya manusia, sehingga mereka mampu mengidentifikasi dirinya untuk suatu permasalahan yang di alami dan berupaya untuk mencari alternative untuk memecahkan masalah-masalah yang di hadapinya.

“Perannya dia itu sebagai pendamping, caranya dia itu ya mendampingi kita gitu lho mas, kasih penyuluhan, setiap bulan kalau ada pertemuan pasti datang, kalau ada apa-apa kita konsultasi sama TKSK”.⁵²

“perannya dia itu menguasai, sebagai pendamping, pengawas, pengontrol dari bantuan tersebut untuk kepanjangan tangan dari

⁵². Wawancara dengan Ibu Erna (Ketua Kube Brumbungan II serta Agen Penyaluran Bansos / E-Warung). Tgl. 25 Juni 2020

Dinsos, kita setiap bulan juga kumpulan di datangi beliau TKSK di situ kita di kasih pengarahan.”⁵³

“jadi TKSK itu memantau, mengawasi mendampingi program itu sampai ke yang bersangkutan atau tidak. Terus kalau ada kesulitan dari KPM untuk mendatangi ke bank karena kaitannya dengan kartu pengambilan, jadi KPM sembako itu tadi dibekali KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yaitu berupa kartu ATM yang dikeluarkan oleh bank himbara (BNI). Intinya TKSK itu 1. Mendampingi kepastian dapat, 2. Mendampingi permasalahan kartu trouble, 3. Mendampingi untuk memastikan barangnya diberikan sesuai dari agennya, 4. Mengedukasi tentang transaksi keuangan non tunai, karena nanti bantuan di ATMnya berupa uang lalu kartu tadi digesek kea gen atau di E – Warung dan dapat barang sesuai nilai bansos (200 ribu) barangnya berupa beras 10 Kg, gula 1 Kg, telur 1 Kg, nutrisi seperti buah-buahan dan tambahan ayam 1 Kg. Untuk proses pendataan data sudah ada di Kemensos lalu TKSK hanya memverifikasi dan validasi, apakah di lapangan sudah ada yang pindah atau meninggal”.

“Kalau di Kube peran saya sebagai pendamping program juga, setiap tiga bulan sekali per kelompok di datangi TKSK untuk diskusi serta evaluasi, untuk pelatihan sebelum menjalankan untuk menjalankan usaha tadi kelompok di bimtek sederhana tentang keuangan (pengelolaan keuangan). Kinerjanya ya setiap 1 bulan sekali perkelompok mengadakan rapat atau temu anggota yang tujuannya untuk membahas perkembangan hasil yang dilakukan oleh setiap kelompok, dan setiap 3 bulan sekali pasti mendatangkan TKSK”.⁵⁴

3. Tujuan Pemberdayaan Program

Tujuan dari pemberdayaan yang dilaksanaka oleh TKSK Semarang Tengah Kota Semarang dalam memberdayakan PPKS fakir miskin di sini merupakan suatu tujuan yang mulia, karena dengan adanya pemberdayaan melalui program-program ini masyarakat miskin di sini bisa mencapai

⁵³. Wawancara dengan Bapak Mujianto (Ketua KUBE se Kelurahan Brumbungan), 25 Juni 2020

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Sholikin (TKSK Semarang Tengah sekaligus Koordinator TKSK se Kota Semarang) Tentang Peran Pendampingan di Bansos (Sembako) dan di KUBE, 22 Juni 2020

kesejahteraannya dan mandiri, dalam arti tidak menjadi masyarakat yang ketergantungan.⁵⁵

“Untuk tujuannya, arahan pemerintah memang bagus intinya supaya kita-kita itu mandiri, orang kalau mandiri otomatis orang tersebut kuat, kalo orang kuat tidak begitu besar mengharapkan bantuan. Supaya kita kuat dalam brkelompok untuk menjalankan dan melindungi kelompok bersama-sama, karena dengan kegiatan tersebut kita dijanjikan pemerintah untuk berwira usaha, Cuma mereka-mereka ada yang kurang menyadari.

Dalam hal ini bapak sholikin juga menambahkan keterangan untuk tujuan dari pemberdayaan PPKS fakir miskin yang telah dilakukannya di masing-masing program yang di dampunginya yaitu.⁵⁶

“Jadi tujuan untuk program bansos sembako ini kan komoditas yang dapat di beli seingga tidak hanya berupa beras dan telur pada program BPNT yang lama dan ini supaya dari pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok yang dengan kandungan gizi gitu, karerena apa? Dari garis keinginan memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan garis kemiskinan, selain itu stabilitas harga mempengaruhi penurunan angka kemiskinan.

“adapun program sembako ini juga memiliki tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam hal makanan (sehari-hari), sehingga dapat memastikan kebutuhan dasar keluarga miskin terpenuhi. Disisi lain pengembangan jenis pangan yang terdapat pada program ini akan mampu meningkatkan nutrisi dan gizi masyarakat terutama untuk anak-anak sejak dini, sehingga akan memiliki pengaruh terhadap penurunan. Bahan pangan untuk program sembako adalah sumber karbohidrat seperti beras, sumber protein hewani seperti telur dan daging, sumber protein nabati seperti kacang-kacangan termasuk tahu dan tempe, dan sumber mineral dan vitamin lainnya seperti sayur dan buah-buahan. Ini tujuan untuk program bansos sembako”

⁵⁵. Wawancara dengan Bapak Mujianto (Ketua KUBE se Kelurahan Brumbungan), 25 Juni 2020

⁵⁶. Wawancara dengan Bapak Sholikin (TKSK Kecamatan Semarang Tengah sekaligus Koordinator TKSK se Kota Semarang), 19 Juli 2020

Dalam hal ini bapak Sholikin juga menjelaskan tentang tujuan adanya program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu supaya masyarakat mandiri, dan ada nilai dalam bersosial.

“untuk program pemberdayaan KUBE, tujuannya jadi supaya dia bisa mandiri dalam hal ekonomi, yang tadinya pas-pasan sekarang ada kegiatan yang ekonomi ini bisa menambah penghasilan. di samping itu tujuan dari pemerintah memberikan program KUBE ini untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan usaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan dalam bersosial.”

4. Pendanaan atau Bantuan Program

Jadi dalam pemberdayaan PPKS fakir miskin yang dalam pendampingan TKSK Semarang Tengah, bahwa TKSK selalu mengusahakan untuk mereka yaitu sebuah pendanaan serta bantuan untuk pemberdayaan fakir miskin di Semarang Tengah ini dari berbagai sumber, seperti sumber bantuan dari program Bansos sembako sumber dananya berasal dari Kementerian Sosial langsung dari Jakarta (APBN), dari masyarakat setempat, relawan, serta dermawan di manapun berada. Tetapi sumber dana untuk pemberdayaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang di damping TKSK yaitu hanya dari Dinas Sosial Provinsi. Dalam hal ini TKSK juga mengusahakan untuk mereka yang perlu diberdayakan tetapi tidak dapat sasaran bantuan dari pemerintah.⁵⁷

“sumber pendanaan KUBE dari Dinas Sosial Provinsi, kan ada banyak KUBE, namun yang di dampingi TKSK itu KUBE yang dari Dinsos Provinsi atau dari APBD”.

⁵⁷. Wawancara dengan Bapak Sholikin (TKSK Kecamatan Semarang Tengah sekaligus Koordinator TKSK se Kota Semarang), 19 Juli 2020

“Kalo sumber bantuan dari Bansos itu berasal dari pusat Jakarta (Kemensos) sumber dananya dari APBN. Kami sebagai TKSK juga mengusahakan untuk mencarikan bantuan, baik dari pemerintahan, masyarakat, dermawan dimanapun mereka berada dan tidak harus dari Semarang Tengah. Kami juga tetap mengusahakan bantuan untuk fakir miskin lain yang belum dapat, 1. Bansos sembako yang belum dapat, 2. Kelompok KUBE yang belum disetujui, 3. Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJS) 4. Bansos alat-alat disabilitas untuk warga miskin”.

Membahas tentang bantuan apa yang di terima oleh KPM, ibu Kasih selaku KPM Bansos sembako menuturkan bahwa bentuk bantuan dari dulu sampai sekarang selalu berbeda.⁵⁸

“Waktu dulu-dulu, waktu suami saya masih hidup dapat uang BLT, habis itu kan yang tidak punya-punya waktu dulu kan mendapatkan 1 karung beras, habis itu kan masih ada yang ngiri, kok ini sekian-sekian pada dapat semua, di situ ada yang tidak dapat, terus lama-lama beras yang satu karung itu dibagi-bagi. Yang dapat dulu di sini kan hanya beberapa orang saja yang dapat beras satu karung it uterus lama-lama dibagi-bagi, dan terus habis itu dapatnya yang 10 Kg sampai sekarang”

“Dapatnya kalo sekarang ya beras 10 Kg, telur 1 Kg, kadang ada tempe, buah kadang salak kadang manggis, terus ada tambahannya ayam 1 Kg”

5. Pelaksanaan Program

Untuk pelaksanaan dari masing-masing program pemberdayaan PPKS fakir miskin berbeda-beda seperti program bansos sembako diberikan bantuan secara langsung yaitu berupa sembako di lapangan setiap tanggal 20 pada setiap bulannya, namun sebelum diterapkannya pelaksanaan pembagian bantuan KPM di berikan sosialisasi, dan pengedukasian tentang tata cara untuk pengambilan bantuan, dalam hal tersebut memang diperlukan sosialisasi dan pengedukasian kepada KPM

⁵⁸. Wawancara dengan Ibu Kasih (KPM Bansos Sembako), 25 Juni 2020

dikarenakan system yang mengharuskan KPM kaitannya dengan perbankan, untuk pelaksanaan tersebut yaitu di masing-masing agen dan E-Warung.

Untuk program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) selain ada pendedukasian juga ada pelatihannya yaitu terkait dengan bimbingan teknis (bimtek), manajemen, serta pembukuan atau perekapan. Pelaksanaan di KUBE yaitu menjalankan kinerja kelompok seperti menjalankan sebuah usaha penjualan tabung gas LPG 3 kg, dalam pelaksanaan ini juga diadakannya pertemuan di setiap bulannya di kelompok masing-masing, untuk tempat pelaksanaan di setiap kelompok KUBE masing-masing sebagaimana yang sudah ditetapkan TKSK pada dua Kelurahan yang telah mendapatkan program tersebut.

“kalau di Bansos sembako tidak ada pelatihan tetapi pendedukasian dan advokasi tentang cara-caranya pengoprasian alat elektronik, di karenakan dari penerima Bansos sembako tadi harus dengan kartu ATM dalam arti memberikan edukasi tentang perbankan”

“Kalau di KUBE pelatihannya sebelum menjalankan usaha tadi kelompok harus di Bintek (bimbingan teknis) sederhana tentang pengelolaan keuangan istilahnya pembukuan atau perekapan. Setiap satu bulan sekali di situ per kelompok kan mengadakan rapat atau temu anggota yang tujuannya untuk membahas perkembangan hasil yang dilakukan setiap kelompoknya dan setiap 3 bulan sekali mendatangkan TKSK”.⁵⁹

Selanjutnya ibu Erna menuturkan tentang proses kinerja dari kelompok KUBE, mengenai system kerjanya yaitu tergantung pada struktur dari tugas masing-masing di kelompoknya.⁶⁰

⁵⁹. Wawancara dengan Bapak Sholikin (TKSK Kecamatan Semarang Tengah sekaligus Koordinator TKSK se Kota Semarang), 22 Juni 2020

⁶⁰. Wawancara dengan Ibu Erna (Ketua Kube Brumbungan II serta Agen Penyaluran Bansos / E-Warung). Tgl. 25 Juni 2020

“yang di lakukan yaitu mas, kita sama-sama menjualkan barang gas LPG, ya tidak semua anggota menjualkan, masalahnya sulit sih ya semuanya ada pada punya, paling dia mengambil nanti di jual sendiri, di pakai sendiri, khususnya kita untuk anggota dulu yang terpenting, kalau dari luar boleh membeli juga pastinya”

“untuk yang manajemen itu ada sendiri mas, untuk keuangan yaitu bendahara, kalau saya kan yang ngasih pengarahan, tiap bulannya kan ada kumpulan membahas cara kerja anggotanya gimana, tapi gimana ya mas, anggotanya pada sulit, pada hal sudah saya kasih pengarahan gini-gini, ya tidak mau, padahal kan ini usaha kita bersama, tetapi tidak menjalankan usahanya”

“yang kulakan kita sendiri, yang tabung ini kita cari suppyaler atau agen sendiri mas, KUBE itu setiap kelompok cari sendiri, seperti ini kita cari suplayer sendiri, yang mengambil atau yang kulakan saya sendiri, seharusnya kan ya gentian mas.”

Pada program bansos sembako Ibu kasih sebagai KPM bansos sembako juga menerangkan tetang cara pengambilan, waktu, dan tempat pengambilan bantuan tersebut.

“Setau saya dulu yang mendata dari pak RT di usulkan ke Kelurahan, lalu di usulkan ke Kecamatan lalu di usulkan lagi ke Dinas Sosial, trus sama TKSK. Kalau dulu pengambilannya di mana-mana bisa, sekarang netep di sini, soalnya ada warung khusus untuk pengambilan kalau mau mengambil bantuannya, kan tinggal gesek kartu ATMnya saja”.

6. Dukungan Program Pemberdayaan

Ada beberapa pendukung yang dapat melancarkan jalannya sebuah proses pemberdayaan fakir miskin pada masing-masing program yang di dampingi oleh TKSK di Kecamatan Semarang Tengah ini, diantaranya yaitu pendanaan, modal, sarana dan prasarana, serta akses yang dapat memudahkan dan melancarkan untuk menjalankan pemberdayaan dari program-program tersebut.

Untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dana tersebut berupa modal, sebagai mana permodalan ini memang hanya di awal saja yang langsung turun dari Dinsos Provinsi (APBD), dan dari masing-masing kelompok tadi mendapatkan dana stimulant sebagai modal awal yaitu berupa tabung gas LPG 3 kg beserta isinya sebagai mana yang telah di tuturkan oleh KSK.⁶¹

“Untuk pendukung KUBE yaitu pemberian modal satu kali saja, dan itu berupa barang, yaitu tadi berupa tabung gas LPG 3 kg 57 biji per kelompoknya, selai itu juga tempat untuk menjalankan usaha yaitu di rumah salah satu anggota kelompok yang telah ditunjuk untuk dijadikan tempat usaha KUBE.”

Untuk bansos sembako ada beberapa pendukung selain dari pendanaan juga ada alat untuk pengambilan bansos sembako tersebut yaitu berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu berupa ATM, juga mudahnya akses dalam pengambilan sembako untuk KPM yang sudah di sediakan di kelurahan masing masing, yaitu berupa E-Warung dan agen pengambilan Bansos sembako.⁶²

“Dukungannya yaitu dana sudah rutin setiap bulan di kasih untuk pencairan, kartu KKS berupa ATM tadi, tempat pencairan sudah di sediakan di agen-agen dan e-warung, dan aksesnya juga dekat langsung di kelurahan masing-masing.”

Membahas tentang agen dan E-Warung untuk pencairan bansos sembako ini adalah salah satu dari program Bansos sembako yaitu ciptaan tangan panjang dari pemerintah untuk tempat penyaluran bansos sembako bagi KPM fakir miskin, tujuannya yaitu untuk mengurangi kecurangan, supaya mudah dikontrol, supaya tepat sasaran dalam waktu dan jumlah.

⁶¹. Wawancara dengan Bapak Sholikin (TKSK Kecamatan Semarang Tengah sekaligus Koordinator TKSK se Kota Semarang), 22 Juni 2020

⁶². Wawancara dengan Bapak Sholikin (TKSK Kecamatan Semarang Tengah sekaligus Koordinator TKSK se Kota Semarang), 22 Juni 2020

D. Hasil Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Dalam rangka pemberdayaan yang diselenggarakan oleh TKSK kepada PPKS fakir miskin di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang tentunya sangat diharapkan memberikan sebuah hasil, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin di Semarang Tengah untuk meningkatkan kemandirian mereka juga meningkatkan kesejahteraannya, juga menumbuhkan rasa kepedulian untuk masyarakat sekitar terhadap fakir miskin. Hasil dari pemberdayaan PPKS oleh TKSK di Semarang Tengah focus pada pemberdayaan fakir miskin sebagaimana yang telah saya teliti, yang di mana di situ TKSK sangat antusias dalam mendampingi pemberdayaan fakir miskin pada beberapa program yaitu program Bansos sembako dan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Hasil dari masing-masing program pemberdayaan yang di dampingi oleh TKSK mencakup pada dua aspek diantaranya yaitu :

1. Aspek Sosial

Berdasarkan penelitian yang telah di ketahui oleh peneliti bahwa dalam rangka pemberdayaan program yang telah diberikan kepada PPKS fakir miskin yang di damping oleh TKSK di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang menimbulkan hubungan social yang baik antara individu penerima manfaat program dengan yang lainnya, juga dirasakan timbulnya hubungan social juga antara KPM kepada masyarakat, dan juga kepada atasan seperti pemerintah. Karena apa, dalam hal

memberikan bantuan dalam memberdayakan program tadi tidak jalan tanpa adanya rasa social serta kepedulian dari pihak-pihak terkait.

Adapun hasil pemberdayaan program pada bansos sembako sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sholikin selaku TKSK yang mencakup pada aspek social bahwa :

“manfaat dari pemberdayaan program bansos sembako ini manfaat sosialnya adalah dengan interaktif di agen dengan KPM yang lainnya akan meningkatkan interaksi atau kepedulian sosialnya antar warga akan tercover artinya saling mensupport, bahwa ternyata hubungan social kita perlu ditingkatkan dengan yang lainnya”

Begitu juga hasil pemberdayaan pada program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) telah menimbulkan hasil manfaat secara social sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Sholikin selaku TKSK Semarang Tengah Kota Semarang yaitu :

“Untuk pemberdayaan program KUBE ini manfaatnya sosialnya besar sekali, karena setiap kelompok dalam satu bulan atau dua bulan sekali ini kan harus kumpul, di situ dengan setatus social yang berbeda-beda akan menjadikan satu kegiatan kepedulian, karena kalau di KUBE ini ibaratnya pertanggung jawaban *gandeng renteng* di mana satu belum bisa membayar semua yang lainnya harus menanggung untuk masuk di kegiatan, dari situ sisa dari sisa usahanya dikumpulkan menjadi satu, begitu juga nanti akan dapat sisa yang dikumpulkan dari usaha itu tadi akan dibagi ke anggotanya lagi, ya tergantung kesepakatan hasilnya mau dibagi enam bulan sekali atau satu tahun sekali”

2. Aspek Ekonomi

Berdasarkan data dari hasil penelitian telah diketahui bahwa hasil pemberdayaan PPKS fakir miskin yang di damping oleh TKSK di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada masing-masing program yaitu program bansos sembako dan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari aspek ekonomi, bahwa dengan adanya program-program tersebut ekonomi masyarakat miskin di Kecamatan Semarang

Tengah Kota Semarang telah terbantu khususnya pada KPM bansos sembako, begitu pula pada setiap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) telah mengalami peningkatan ekonominya dari menjalankan usaha yang telah di jalannya.

Untuk program bansos sembako sebagaimana yang telah di katakan oleh bapak Sholikin selaku TKSK Semarang Tengah Kota Semarang bahwa dengan adanya program bansos sembako masyarakat miskin khususnya KPM memiliki manfaat bahwa ekonomi mereka telah terbantu dalam segi pangan, dan juga telah meringankan beban masyarakat fakir miskin sebagai mana hasil ekonomi dari hasil kerja fakir miskin tidak dibebankan oleh pangan, dengan itu hasil ekonomi dari kerja tadi bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya selain kebutuhan pangan.⁶³

“untuk manfaat ekonominya begitu juga ada , dengan adanya program bansos sembako ini akan meningkat juga kinerjanya dalam arti untuk mencari nafkah untuk kepala keluarga jadi bansos sembako ini untuk menambah, dalam arti mengurangi beban karena dengan mendapatkan bansos sembako ini sudah tidak berfikir atau khawatir untuk kebutuhan pokoknya, artinya kebutuhan yang tadinya untuk makan pokok sehari-hari sudah ada pada bansos. Jadi penghasilan dari hasil bekerja bisa untuk kebutuhan yang lainnya, untuk ekonomi yang lain misalnya untuk biaya sekolah dan kebutuhan lainnya.”

Begitu juga dengan ibu Kasih sebagai KPM mengatakan bahwa dengan adanya program bansos sembako yang telah diberikan kepada fakir miskin telah memberikan manfaat salah satunya yaitu membantu meringankan beban ekonomi untuk keluarganya.⁶⁴

“Manfaatnya ya untuk makan sehari-hari, kan sekarang kita tidak kerja, tiap hari kan anak-anak belum bisa mencukupi ekonominya, untuk kebutuhannya dia sendiri aja masih kurang, kan

⁶³. Wawancara dengan Bapak Sholikin (TKSK Kecamatan Semarang Tengah sekaligus Koordinator TKSK se Kota Semarang), 22 Juni 2020

⁶⁴. Wawancara dengan Ibu Kasih (KPM Bansos Sembako), 25 Juni 2020

kadang dapat bantuan dari anak-anak untuk belanja sehari-hari, kalo dapat bantuan yang dari sembako ini untuk sehari-hari juga.

Begitu juga telah memberikan manfaat secara ekonomi untuk PPKS fakir miskin pada pemberdayaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Sebagai mana yang telah dikatakan oleh bapak Sholikin dengan adanya program KUBE masyarakat miskin yang telah mengikuti program tersebut mengalami peningkatan ekonomi, jadi perekonomian mereka dapat terbantu.⁶⁵

“Dari segi manfaat ekonominya juga itu tadi meningkatkan perekonomian keluarga untuk menambah kebutuhan-kebutuhan yang belum tercover, walaupun itu istilahnya tidak seberapa tapi itu bisa membantu untuk ekonomi keluarga untuk masyarakat miskin.”

Hasil secara ekonomi dan kemajuan dalam menjalankan usaha juga telah dirasakan oleh anggota KUBE yaitu ibu Erna sebagaimana yang dikatakan bahwa dalam menjalankan usaha penjualan tabung gas LPG 3 kg dapat memutar hasil untuk usahanya, dan benar-benar ada keuntungan dari penjualan tersebut. Dan hasilnya yaitu sebagian untuk khas kelompok dan sisanya untuk dibagikan kepada anggota kelompok.⁶⁶

“Kalau KUBE ya semakin maju, walaupun hasil akhir kan bisa dilihat setelah tiga tahun, walaupun belum sampai tiga tahun sudah terlihat ada hasil. Dari hasil penjualan tadi di putar terus tapi juga ada keuntungan dari hasil penjualan tersebut kan di ambil 20% dibuat kas yang 80% dibagi ke anggotanya. Itu dibaginya terganung kelompoknya, mau dibagikan satu bulan satu kali ya tidak apa-apa, satu tahun satu kali juga tidak apa-apa, kalau di sini satu tahun satu kali.”

⁶⁵. Wawancara dengan Bapak Sholikin (TKSK Kecamatan Semarang Tengah sekaligus Koordinator TKSK se Kota Semarang), 22 Juni 2020

⁶⁶. Wawancara dengan Ibu Erna (Ketua Kube Brumbungan II serta Agen Penyaluran Bansos / E-Warung). Tgl. 25 Juni 2020

“untuk ekonomi ada manfaatnya, kalau yang dari penjualan tabung gas satu tahun sekali, kan lumayan mas setiap bulan ada pemasukan dan itu pasti, kan juga banyak ibu-ibu yang tidak kerja, jadi sangat bermanfaat dari hasil tadi bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari.”

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Proses Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Adanya penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) yang menjadi prioritas utamanya adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung, terkhusus pada masalah kemiskinan. Mengenai permasalahan kemiskinan bukan hanya dari permasalahan ekonomi saja, akan tetapi juga merupakan suatu permasalahan social yang kompleks. Sehingga perlu adanya pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang melibatkan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu pendekatan dalam menelaah dan menangani kemiskinan sangat tepat dan efektif jika melibatkan prespektif pekerjaan social (*social work*).⁶⁷ TKSK adalah pekerja social sebagai salah satu penyelenggara Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) yang diturunkan langsung dari Dinas Sosial melalui Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial di sini memiliki tujuan untuk mensejahterakan ekonomi serta social PPKS khususnya fakir miskin di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang guna untuk peningkatan keberdayaan melalui beberapa program yang di dampingi. Adapun program-program untuk mensejahterakan PPKS fakir miskin melalui pemberdayaan yang di dampingi oleh TKSK yaitu program Bansos (sembako) dan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pemberdayaan PPKS oleh TKSK di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagai mana yang saya teliti yaitu focus pada pemberdayaan fakir miskin yang di dampingi oleh TKSK yang memiliki

⁶⁷. Edi Suharto. *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*, STKS Bandung Press : Bandung. 2003

tujuan untuk memberdayakan serta mensejahterakan PPKS khususnya fakir miskin. TKSK adalah sebagai salah satu penyelenggara Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) memiliki suatu tujuan yaitu untuk membantu pemenuhan kebutuhan, mencegah dari kemiskinan, serta mengatasi masalah kesejahteraan social mereka melalui program-program pemberdayaan kemiskinan yang di dampinginya. Sebagai mana yang dikatakan oleh bapak Sholikin bahwa :

“untuk pemberdayaan di sini TKSK itu mendampingi warga atau masyarakat miskin di mana supaya dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri secara maksimal, salah satunya diberdayakan dengan memberikan Bansos dan program KUBE dibagian mandiri istilahnya supaya dia itu mandiri, memberdayakan mereka yang selama ini kekurangan kita dayakan melalui Bansos dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).⁶⁸

Hal di atas sesuai dengan pendapat Edi Suharto bahwa, secara teoritis pemberdayaan yaitu serangkaian kegiatan atau yang tujuannya untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan individu maupun kelompok lemah dalam masyarakat yang mengalami kemiskinan.⁶⁹ Maka dari itu pemberdayaan PPKS fakir miskin yang di dampingi oleh TKSK di Semarang Tengah merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin diciptakan oleh sebuah perubahan social serta ekonomi yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melakukan tugas-tugas kehidupannya.

⁶⁸. Wawancara dengan Bapak Sholikin (TKSK Kecamatan Semarang Tengah sekaligus Ketua TKSK se Kota Semarang), 22 Juni 2020

⁶⁹. Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Revika Aditama : Bandung, 2014. Hlm. 59

Hal di atas juga sesuai dengan pendapatnya Edi Suharto yaitu bahwa tujuan Pembangunan Kesejahteraan sosial (PKS) adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup⁷⁰

- d. Meningkatkan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial. Dengan adanya program bansos sembako dan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang di dampingi oleh TKSK di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang adalah bentuk pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan standard hidup PPKS fakir miskin melalui pelayanan kesejahteraan yang didampingi TKSK sebagaimana tangan panjang dari Dinas Sosial.
- e. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan. Dengan terselenggaranya pelayanan kesejahteraan dalam bentuk pemberdayaan yang telah di dampingi TKSK kepada PPKS fakir miskin melalui program bansos sembako dan KUBE adalah bentuk peningkatan keberdayaan kepada mereka sebagaimana untuk perbaikan serta peningkatan dari aspek ekonomi maupun social mereka dengan tujuan menunjang harga diri dan martabat mereka dari berbagai bentuk dikriminasi dan penindasan supaya mereka tidak merasa terpinggirkan.
- f. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan

⁷⁰. Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*..... Hlm. 5

dan standar kemanusiaan. Salah satu tujuan TKSK dalam memberdayakan PPKS fakir miskin yaitu dengan memberikan kesempatan sesuai dengan kemampuan mereka supaya mereka terbebas dari segala bentuk keterhambatan dan penindasan yaitu dengan memberikan perluasan aksesibilitas yang tepat dan sesuai kemampuan yang di milikinya sehingga mereka dapat menerima dan menjalankan serta mengembangkan sarana dan prasarana yang telah diberikan kepada mereka sebagaimana dalam bentuk program pemberdayaan yang di jalannya. Dengan diberikannya program-program tersebut supaya mereka dapat berkembang, mandiri dan sejahtera dalam menjalankan kehidupannya secara sempurna.

Berikut adalah analisis proses pemberdayaan PPKS oleh TKSK di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagaimana focus pada pemberdayaan fakir miskin melalui program bansos sembako dan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan menggunakan teori Edi Suharto yang dikutip oleh Al-Fitri melalui penerapan serta pendekatan yang disingkat 5P diantaranya yaitu : ⁷¹

1. Pemungkinan

Maksud dari pemungkinan di sini yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara optimal. Maka dari itu pemberdayaan harus membebaskan sesuatu yang terhambat dari diri masyarakat tersebut. Pada proses ini TKSK telah melakukan pendataan kepada masyarakat fakir miskin di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang untuk diberdayakan melalui program pemberian bansos sembako dan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang

⁷¹. Alfitri, *Community Development Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2011. Hlm. 26

sebagaimana program tersebut ialah program pemberdayaan yang telah didampingi oleh TKSK. Tujuan dari pemungkinan di sini yaitu untuk memungkinkan masyarakat supaya berkembang secara optimal, sebagaimana program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu salah satu program pemberdayaan yang didampingi oleh TKSK di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada program tersebut masyarakat fakir miskin diberikan sebuah usaha yaitu berupa penjualan tabung gas LPG 3 kg, dikarenakan bahwa LPG 3 Kg laku keras di pasaran dan hampir semua penduduk menggunakannya, dan bagus sekali untuk penerima KUBE untuk meningkatkan pendapatan keluarga guna menunjang kebutuhan sehari-hari, pada umumnya yang melakukan penjualan ini ada kemajuan, hanya perlu pendampingan serius untuk mengerjakan pembukuan agar setiap transaksi tercatat dan bisa melihat perkembangan selanjutnya. Jadi melalui program KUBE ini masyarakat miskin yang diberdayakan mampu berkembang untuk menjalankan sebuah usaha yang telah di dampingi oleh TKSK. Pada proses ini juga bertujuan untuk memberikan kebebasan dari suatu keterhambatan sebagaimana pada program bansos sembako yang telah diberikan kepada PPKS fakir miskin di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang yang di damping oleh TKSK, dengan adanya program bansos sembako ini fakir miskin telah diberdayakan dan di sejahterakan, karena dalam hal ini dimungkinkan bahwa masyarakat fakir miskin akan terbebas dari hambatan secara social dan ekonomi.

2. Penguatan

Maksudnya yaitu adanya penguatan dan kemampuan yang diberikan kepada masyarakat sehingga mampu memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya, sehingga masyarakat mampu berkembang dan percaya diri dengan segenap kemampuannya yang mana akan menunjang

kemandirian masyarakat. Pada proses ini TKSK telah memberikan penguatan kepada PPKS fakir miskin di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang melalui program bansos sembako dan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), bentuk penguatan yang dilakukan dalam pemberdayaan pada ke dua program ini adalah dengan memberikan modal atau dana stimulant. Seperti halnya pada program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu diberikannya modal yang sumbernya dari APBD yang di berikan melalui Dinsos provisnsi. Modal yang diberikan untuk program KUBE ini hanya diperuntukkan untuk kepentingan usaha dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis mereka, karena hal tersebut berhubungan dengan penguatan kepada PPKS fakir miskin yang mendapatkan program tersebut supaya mereka dapat memutar modal tadi supaya usaha mereka tetap bertahan dan berjalan. Setelah tahapan pemberian modal di serahkan dari pendamping memberikan kewenangan kepada mereka yang telah mendapatkan program KUBE dalam hal ini seluruh kelompok KUBE yang ada di Semarang Tengah Kota Semarang yang di dampingi TKSK di seragamkan yaitu diberikannya modal awal tadi dalam bentuk tabung gas LPG 3 kg, pada masing-masing kelompok mendapatkan 57 tabung gas LPG 3 kg beserta isinya. Pada tahapan pemberian modal ini dari pihak penerima tidak perlu mengembalikannya dikarenakan modal tadi adalah sebagai hibah. Begitu juga penguatan pada program bansos sembako yaitu dengan pemberian bantuan secara langsung kepada KPM yang sumber dananya tadi yaitu dari APBN melalui Kemensos RI, tujuan diberikannya program bansos sembako adalah termasuk salah satu penguata kepada PPKS fakir miskin supaya mereka dapat tercukupi dalam hal kebutuhan pangannya serta meringankan beban perekonomian mereka sehingga mereka dapat terbebas dari suatu hambatan.

3. Perlindungan

Perlindungan, yaitu adanya perlindungan terutama kelompok yang lemah dari sekelompok yang kuat dan menghindari persaingan yang tidak seimbang. Hal ini akan mencegah terjadinya penindasan dan eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Maksud dari tahapan disini yaitu diartikan sebagai perlindungan kepada PPKS fakir miskin di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang yang diberdayakan oleh TKSK supaya mereka tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dengan yang lemah. Dalam hal ini TKSK telah memberikan perlindungan kepada PPKS fakir miskin melalui program pemberdayaan yang telah di dimpinginya tujuannya tidak lain hanyalah untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yaitu pada kelompok-kelompok KUBE supaya usaha yang jalannya tidak kalah saing pada usaha-usaha di luar KUBE dengan usaha yang serupa, dikarenakan program ini adalah sebuah usaha kecil karena memberikan perlindungan untuk usaha kecil termasuk memberikan kesempatan kepada mereka supaya mereka mampu untuk mempertahankan dalam mengembangkan usaha mereka dan supaya mereka tetap memiliki jiwa wirausaha. Oleh karena itu dari bentuk perlindungan tadi mereka dapat terus menjalankan usahanya supaya mereka dapat meningkatkan sector perdagangannya melalui program tersebut. Untuk program bansos sembako bentuk perlindungan yang telah diberikan TKSK adalah dengan cara mengusahakan apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Dalam melakukan perlindungan kepada PPKS fakir miskin pada program ini TKSK mengusahakan supaya hak mereka itu tetap terpenuhi dan supaya mereka dapat tercukupi dalam memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan pangannya dan tidak tertindas pada kelompok kuat.

4. Penyokongan

Penyokongan yaitu adanya *support* atau dukungan supaya masyarakat mampu melakukan peranan dan tugasnya. Jadi pada intinya pemberdayaan mampu memberikan dukungan kepada masyarakat supaya mereka mampu menjalankan tugasnya dan tidak merasa terpinggirkan. Bentuk penyokongan pada proses pemberdayaan di sini yaitu memberikan bimbingan, dukungan, serta pendampingan supaya PPKS fakir miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas dalam kehidupannya. Melalui program bansos sembako dan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) TKSK telah memberikan bimbingan, dukungan, serta pendampingan. Untuk program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), TKSK telah memfasilitasi dalam arti telah memberikan pendampingan untuk mereka dalam menjalankan sebuah program yang telah diberdayakannya. Tujuan diberikannya pendampingan pada program ini adalah untuk memberikan tambahan wawasan pengetahuan tentang berwirausaha, manajemen yang baik supaya usaha yang dijalani mereka dapat berjalan, bertahan serta berkembang. Selain bentuk penyokongan diatas antara lain yaitu pemberian modal dalam hal ini TKSK telah mengusahakan untuk mereka berupa dana stimulant yang telah diusahakan lewat APBD yaitu yang bersumber dari Dinsos Provinsi pemberian modal ini merupakan penunjang yang diberikan kepada kelompok-kelompok KUBE untuk menjalankan usaha mereka. Begitu juga pada program bansos sembako salah satu bentuk penyokongannya adalah dengan memberikan pendampingan kepada KPM, tujuan dengan diberikannya pendampingan pada program ini supaya proses-proses untuk mendapatkan hak mereka berupa bantuan akan lebih terarah, mulai dari pendataan sampai pencairan bantuan. dalam hal lain untuk penyokongan program ini yaitu dengan diberikannya kemudahan akses dalam

pengambilan hak mereka yaitu berupa sarana dan prasarana berupa alat pencairan bantuan serta tempat untuk pencairan bantuan dengan pelayanan yang efektif dan efisien.

5. Pemeliharaan

Maksud dari pemeliharaan di sini yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi sehingga setiap orang memiliki kesempatan berusaha. Istilah pemberdayaan sendiri dipakai untuk menggambarkan individu seseorang seperti yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan setiap aktifitas masing-masing individu memiliki kontrol disemua aspek kehidupannya sehari-hari yang bertujuan sebagai bukti keberadaan dan keberdayaannya. Pada pendekatan proses ini TKSK telah melakukan pemeliharaan kepada PPKS fakir miskin pada program pemberdayaan yang di dampinginya. Untuk program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) TKSK mengajak mereka yaitu kelompok-kelompok KUBE supaya diadakannya rapat musyawarah di setiap bulannya dalam hal ini TKSK memberikan sebuah dorongan, motifasi, serta evaluasi kepada setiap kelompok KUBE di saat rapat musyawarah berlangsung supaya usaha mereka dapat terpelihara istilahnya dapat bertahan dan berkembang. Selain itu TKSK juga melakukan pengontrolan pada masing-masing kelompok untuk memastikan kinerja mereka dalam menjalankan usaha yang telah dijalankannya salah satunya tentang kedisiplinan anggota pada masing-masing kelompok KUBE. Untuk program bansos sembako dalam hal pemeliharaan TKSK telah melakukan pemeliharaan system dari yang manual sampai menuju yang modern, selain itu TKSK juga melakukan verifikasi data KPM di setiap bulannya, dengan tujuan untuk memperjelas data siapa KPM yang masih berhak untuk disejahterakan melalui bansos sembako dalam arti masih belum mampu dan yang sudah tidak berhak menerima bantuan tersebut dalam

arti sudah mampu, pada bagian ini TKSK juga tetap mengusahakan untuk mencari bantuan kepada PPKS fakir miskin yang masih berhak menerima akan tetapi data KPM tadi tidak terverifikasi yaitu melalui sumbangan-sumbangan yang telah di berikan dari masyarakat dermawan.

B. Analisis Hasil Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Analisis dari hasil penelitian mengenai pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang yang berfokus pada pemberdayaan untuk fakir miskin melalui program bantuan social sembako dan juga program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bahwa hasil dari pemberdayaan melalui program tersebut dapat diketahui melalui dua aspek diantaranya yaitu :

1. Aspek Sosial

Untuk hasil dari segi social pada program basos sembako bahwa program tersebut dapat meningkatkan interaktif dari KPM dengan yang lainnya pada saat di agen dan menumbuhkan kepedulian masyarakat lainnya untuk warga miskin, dimana dalam program tersebut bisa tercover dalam arti masyarakat saling *mensupport* dari satu dengan yang lainnya bahwa kepedulian terhadap mereka itu perlu ditingkatkan dan juga di perhatikan. Disamping itu dengan adanya program bansos sembako untuk memberdayakan serta mensejahterakan PPKS untuk masyarakat fakir miskin telah tercipta beberapa agen serta E-Wrung yang telah di sediakan di kelurahan masing-masing dari pemerintah yang bekerja sama dengan bank himbara (BNI) khusus untuk warga miskin.

Hasil dari segi social untuk program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bahwa setiap bulannya perkelompok dapat kumpul bersama dari status social yang berbeda-beda, di situ juga menjalin suatu kerjasama dalam sebuah misi yaitu dalam sebuah kelompok yang terorganisir guna menjalankan usahanya, dan diantara satu dengan yang lain dalam satu kelompok bisa saling membantu jika ada suatu kekurangan, dan juga kepada masyarakat sekitar

2. Aspek Ekonomi

Untuk hasil dari segi ekonomi pada program sembako yang telah diberikan kepada PPKS fakir miskin di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, bahwa kebutuhan mereka untuk pemenuhan kebutuhan pokok dalam hal makanan sehari-hari sudah tercover di bansos sembako, jadi tidak perlu khawatir dalam hal ini, dan sehingga hasil ekonomi dari kerja kepala keluarga bisa untuk kebutuhan lainnya selain kebutuhan pangan seperti untuk biaya anak sekolah dan untuk biaya kebutuhan sehari-hari lainnya.

Sedangkan hasil secara ekonomi untuk program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bahwa hasil dari usaha penjualan tabung gas LPG telah mampu untuk meningkatkan penghasilan untuk perekonomian keluarga, dimana hasil tadi diputarakan terus sampai mendapatkan *margin* dan biasanya hasil tersebut dibagikan di setiap kelompoknya dan setiap pembagian hasil tergantung kesepakatan kelompok ada yang enam bulan sekali atau satu tahun sekali. Dalam hal ini kelompok telah mampu menyisihkan uang dari hasil usahanya sebagai khas sebesar 20% per bulannya dan 80% dari keuntungan penjualan tadi di bagikan ke anggotanya per tahun.

Salah satu hasil juga nampak pada program bansos sembako, sebagaimana dengan adanya program ini di Kecamatan Semarang Tengah telah tercipta beberapa agen dan E-Warung yaitu tempat untuk pencairan bansos sembako yang diperuntukkan kepada KPM. Adapun agen dan E-Warung di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang ada di enam titik di antaranya yaitu :

Tabel 4.4

Daftar Data Agen dan E-Warung di Kecamatan Semarang Tengah

No	Kelurahan	Nama Toko	Nama Pemilik Toko	Alamat
1	Kauman	Toko Firza	Ibu Maskuroh	Jl. Kauman Timur No.93
	Melayani wilayah Kelurahan Kauman, Bangunharjo, dan Kranggan			
2	Karang kidul	Toko Trisno	Bp. Sutrisno	Jl. Seroja Timur
	Melayani wilayah Kelurahan Kranggan Kidul			
3	Pendirikan kidul	Toko Laksana	Bp. Laksono	Jl. Bima No.5A
	Melayani KPM dari Kelurahan Pendirikan Kidul dan Pendirikan Lor			
4	Purwodinatan	Toko Rubaidah	Ibu Rubaidah	Kp. Purwadinatan 131
	Melayani KPM dari wilayah Kelurahan Purwodinatan			
5	Miroto	Toko Rizky	Ibu Rubiyati	Jl. Seteran Miroto No. 23
	Melayani KPM dari Kelurahan Miroto, Sekayu, dan Pekunden			
6	Gabahan	Toko Yanti	Ibu Ngat	Karanganyar I

			Priyanti	No.52D
	Melayani KPM dari Wilayah Kelurahan Gabahan			
7	Kembang sari	Toko Hanafi	Ibu Nur Hidayah	Kelengan Kecil No. 627N
	Melayani KPM wilayah Kelurahan Kembang sari			
8	Jagalan	Toko Yuni	Ibu Yuni Widyasari	Jagalan Banteng No.96
	Melayani KPM dari wilayah Kelurahan Jgalan dan Brumbungan			
9	Pandan sari	E-Warung PKH	Farida Aisyah	Kp. Grobogan
	Melayani wilayah Kelurahan Pandan sari			

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menganalisis dari berbagai data di lapangan mengenai pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, maka peneliti akan menarik kesimpulan yaitu hasil jawaban dari rumusan masalah yang telah peneliti rangkum sebagai berikut :

1. Proses Pemberdayaan

Proses dari pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, yang berfokus pada fakir miskin melalui program bansos sembako dan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu melalui 5P diantaranya yaitu :

- a) Pemungkinan, dalam proses ini TKSK melakukan pendataan kepada masyarakat miskin yang berhak mendapatkan program pemberdayaan, serta memungkinkan program apa yang sesuai yang akan diberdayakan kepada PPKS fakir miskin di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sesuai porsi, potensi dan kemampuannya
- b) Penguatan, pada proses ini TKSK memberikan pendanaan sebagai modal dan bantuan yang bersumber dari APBN dan APBD kepada PPKS fakir miskin guna untuk menjalankan program-program pemberdayaan yang di dampinginya

- c) Perlindungan, pada proses ini dimana PPKS fakir miskin di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang diberikan perlindungan dari segala bentuk penindasan dan deskriminasi dari kelompok kuat, termasuk juga memberikan perlindungan pada program yang diberdayakannya
- d) Penyokongan, pada proses ini TKSK telah mendampingi mereka pada masing-masing program dengan memberikan bimbingan, dukungan, serta dorongan dalam rangka memberdayakan serta mensejahterakan mereka, hal lain dari operasional adalah pemberian modal serta bantuan pada masing-masing program pemberdayaan.
- e) Pemeliharaan, pada proses ini TKSK memberikan pengawasan PPKS fakir miskin berupa control, serta evaluasi pada masing-masing program pemberdayaan yang di dampinginya dengan tujuan untuk mempertahankan program-program supaya dapat berkembang.

2. Hasil Pemberdayaan

Hasil dari pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, yang berfokus pada fakir miskin melalui program bansos sembako dan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mencakup dua aspek diantaranya yaitu :

- a) Aspek Sosial, dengan adanya program pemberdayaan yang didampingi TKSK PPKS fakir miskin di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dapat menjalankan aktifitas sosialnya dalam bentuk kepedulian dari individu kepada kelompok masyarakat, antar kelompok, dan dari pemerintahan kepada masyarakat bawah.

- b) Aspek Ekonomi, dengan adanya program pemberdayaan yang telah di dampingi oleh TKSK, PPKS fakir miskin di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dapat terbantu dari hal perekonomian, ekonomi mereka semakin meningkat, dan kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi.

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah di rangkum di atas yang mengenai Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang maka peneliti ajukan saran sebagai berikut

1. Untuk kegiatan program pemberdayaan PPKS fakir miskin yang di dampingi oleh TKSK Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagai Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (PKS) sudah berjalan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya TKSK, maka dari itu untuk PPKS yang di dampinginya diharapkan supaya dapat saling menjalin kerjasama untuk saling memberikan koordinasi supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik.
2. Diharapkan untuk setiap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk bisa kompak saling bekerja sama, melengkapi, dan tidak bergantung dengan anggota yang lainnya dalam menjalankan usaha yang telah dijalannya, karena usaha tersebut adalah usaha untuk kelompok jadi supaya dijalankan secara bersama-sama, dengan harapan usaha kelompok ini terus maju dan terus membawa ke arah yang sejahtera.

3. Diharapkan untuk TKSK supaya tetap semangat menjalankan tugas sebagai relawan Tenaga Kesejahteraan Sosial walaupun sarana dan prasarana dari pemerintah belum sepenuhnya memfasilitasi
4. Diharapkan dari pihak pemerintah pada TKSK supaya memperlancar dalam memfasilitasi sarana dan prasarana apa yang seharusnya menjadi hak TKSK sebagai kebutuhan dalam menjalankan tugasnya.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta ridlonya, memberikan perlindungan, bimbingan dan kasih sayangnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu 'Aalaih Wasallam* yang telah menjadi suri tauladan bagi kita dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya.

Telah penulis sadari bahwa dalam penulisan skripsi ini pasti ada kesalahan dan masih belum sempurna. Maka dari itu jika ada kritik dan saran memang penulis butuhkan untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Penulis hanyalah manusia biasa jika ada salah dan khilaf mohon di maafkan, semoga kita semua mendapatkan taufiq, hidayah, dan ridlo dari Allah *Subhanahu Wata'ala (Aamiin)*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fitri, *Community Development Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta : Yogyakarta, 2002.
- Ayub, M. *Padangaran Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, Unhalu Press : Kendari, 2011.
- Azwar, Syaifudin. *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta : 1998.
- Bachri, Bachtiar S. *meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Universitas Negri Surabaya. 2010.
- Fahrudin, Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, PT Refika Aditama : Bandung. 2012.
- Gugiarto, Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, Suaka Merdeka : Jakarta, 2015.
- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press ; Bandung, 2006.
- Ismail, Asep Usman, *Kesejahteraan Sosial Prespektif Alqur'an*, Jurnal Vol. 4, 2015.
- Jannah, Nur. *Skripsi Pemberdayaan Mahasiswa dalam Program Kantin Kontainer Dompot Dhuafa Jawa Tengah (Studi pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga, UIN Walisongo Semarang, 2018.*
- Kemensos RI
- Kemensos RI, *PERMENSOS RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan*, KEMENSOS RI Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial : 2019.
- Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Panduan TKSK Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Lngsung Sementara Masyarakat (BLSM)*, KEMENSOS RI, 2013.

- Kemnterian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan penyelenggara penerjemah/pentafsir Al-Qur'an : Jakarta. 1971
- Kusnawa, Dadang, *Metodologi Penelitian Sosial*, CV Pustaka Setia : Bandung, 2011.
- Mardikanto, Totok. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*, Alfabeta : Bandung, 2015.
- Mardikanto, Totok. *Pemberdayaan Masyarakat*, Alfabeta : Bandung, 2013
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya : Bandung, 2002.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1999.
- Notowidagdo, Rohiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Taqwa*, Amzah : Jakarta.
- Nurdin, M. Fadil. *Pengantar Keejahteraan Sosial*, Angkasa : Bandung, 1990.
- PID & Media center dinsos Riau
- Permensos RI No. 2 Tahun 2019 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- Prastowo, Andi, *Memahami Metode-metode Penelitian Suatu Tujuan Teoritis dan Praktis*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2016.
- Profile Kecamatan Semarang Tengah 2017
- Presiden RI, *Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial*, 2009.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*, Remaja Rosda Karya : Bandung, 1999.
- Sholikin, *Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan TKSK Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tri Wulan IV*, 2019
- Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2008.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta : Bandung 2011.

Sugiono, *Meode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta : Bandung, 2008.

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, PT Refika Aditama : Bandung , 2005.

_____, *Membangun Masyarakat Mensejahterakan Rakyat*, PT. Refika Aditama : Bandung , 2005.

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, Edisi Ke-1, Cetakan Ke-4, Rajawali Pers: Jakarta. 2016.

Tohirin, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta : Bandung. 2015.

UU RI No. 6 Tahun 1974, Bab II, Pasal 2, Ayat 1, *Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial*

UU RI No. 11 Tahun 2009, Bab I, Pasal 1, Ayat 1, *Tentang Kesejahteraan Sosial*

<https://kecsmgengah.semarangkota.go.id> diakses pada 23 Juni 2020

Wawancara dengan Bapak Sholikin (TKSK Kecamatan Semarang Tengah sekaligus Ketua TKSK se Kota Semarang), tgl 22 Juni 2020 dan tgl 19 Juli 2020

Wawancara dengan Ibu Kasih (KPM Bansos Sembako). Tgl. 25 Juni 2020

Wawancara dengan Ibu Erna (Ketua Kube Brumbungan II serta Agen Penyaluran Bansos / E-Warung). Tgl. 25 Juni 2020

Wawancara dengan Bapak Mujianto (Ketua KUBE), tgl 25 Juni 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

A. Pertanyaan untuk bapak Sholikin (TKSK)

1. Apa yang bapak ketahui tentang pemberdayaan ?
2. Bagaimana pemberdayaan PPKS yang telah dilakukan oleh TKSK ?
3. Apa saja program pemberdayaan untuk PPKS fakir miskin yang didampingi TKSK?
4. Bagaimana proses pemberdayaan untuk masing-masing program ?
5. Di mana kegiatan pemberdayaan dari masing-masing program itu dilaksanakan?
6. Sebagai TKSK apa peran bapak di masing-masing program ?
7. Apa yang menjadi tugas bapak dalam pemberdayaan PPKS fakir miskin untuk masing-masing program?
8. Apa tujuan dari pemberdayaan PPKS yang dilakukan oleh TKSK di masing-masing program
9. Apa manfaat dari pemberdayaan PPKS fakir miskin yang dilakukan TKSK di masing-masing program
10. Apa yang menjadi kendala TKSK dalam pemberdayaan PPKS fakir miskin pada masing-masing program ?
11. Apa yang menjadi pendukung dalam melakukan pemberdayaan PPKS fakir miskin di masing-masing program ?
12. Bantuan apa saja yang telah di usahakan TKSK untuk PPKS fakir miskin ?
13. Bagaimana hasil pemberdayaan PPKS oleh TKSK pada masing-masing program ?

B. Pertanyaan Untuk Pak Mujianto (Ketua KUBE)

1. Bagaimana proses pemberdayaan KUBE yang di dampingi oleh TKSK ?
2. Apa peran TKSK dalam pemberdayaan program KUBE di sini ?
3. Sejak kapan KUBE ini berdiri ?
4. Apa tujuan dari pemberdayaan program KUBE ini ?

5. Manfaat apa yang sudah bapak rasakan dalam mengikuti kegiatan program KUBE ini ?
6. Apa saja kendala yang ada selama melaksanakan kegiatan pemberdayaan program KUBE ini ?

C. Pertanyaan untuk Bu Kasih (KPM bansos sembako)

1. Bagaimana proses untuk mendapatkan bantuan social sembako ?
2. Apa criteria yang berhak mendapatkan bansos sembako ?
3. Bagaimana proses awal pendataan sampai akhir sehingga bisa mendapatkan bansos sembako ?
4. Siapa yang melakukan pendataan untuk siapa saja yang berhak mendapat bansos sembako ?
5. Berupa apa saja yang sudah ibu terima untuk paket sembako ?
6. Bagaimana cara pengambilan bansos sembako ?
7. Di mana tempat pengambilan sembako ?
8. Dengan apa ibu bisa mencairkan bansos sembako ?
9. Apa peran TKSK dalam mendampingi KPM di program bansos sembako ?
10. Apa tujuan di berikannya bansos sembako ?
11. Apa manfaat dari bansos sembako ?

D. Wawancara dengan ibu Erna (anggota KUBE + agen penyaluran sembako / E-Warung)

1. Bagaimana di tempat ibu bisa ditunjuk sebagai penyalur bansos untuk agen E-Warung ?
2. Apa peran ibu di KUBE ini ?
3. Bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan di KUBE ini ?
4. Bagaimana proses perecruitan anggota untuk masuk KUBE ?
5. Siapa saja yang berhak masuk di KUBE ini ?
6. Berupa apa usaha yang ada di KUBE ini ?
7. Bagaimana system kerja pada masing-masing anggota ?
8. Apa saja yang dilakukan di program KUBE ini ?
9. Bagaimana untuk manajemen dan perekapan keuangan dari hasil menjalankan usaha ini ?
10. Bagaimana peran TKSK dalam mendampingi program KUBE ?

11. Apa bantuan awal sebagai modal untuk menjalankan usaha di KUBE ini ?
12. Tahap apa saja dalam pemberdayaan KUBE ini ?
13. apa tujuan dari pemberdayaan program KUBE ini ?
14. Apa manfaat dari pemberdayaan program KUBE ini ?
15. apa kendala selama menjalankan kegiatan pemberdayaan program KUBE ini ?
16. Bagaimana hasil dari pemberdayaan KUBE ?

Data Penerima Bansos Sembako (KPM) dan Data-data KUBE di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

4. Data KPM Program Bansos Sembako di Kecamatan Semarang tengah Kota Semarang⁷²

No.	Nama Kelurahan	Jumlah KPM
1	Bangunharjo	66
2	Brumbungan	54
3	Gabahan	308
4	Jagalan	97
5	Karangidul	91
6	Kauman	60
7	Kembangsari	70
8	Kranggan	54
9	Pandansari	74
10	Miroto	91
11	Pekunden	36
12	Pendirikankidul	22
13	Pendirikanlor	106
14	Purwodinatan	118
15	Sekayu	65
	Jumlah Total	1.312

5. Data-data Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

⁷². Data KPM Aktif Sembako Semarang Tengah Per April 2020

a. KUBE Kelurahan Brumbungan

N O	Nama KUBE	Lokasi	Jumlah Anggot a	Terima Bantuan Pada	Jenis Usaha
1	KUBE Brumbungan I	Jln. Pringgadi ng I / 238	10 orang	19 Oktober 2018	LPG 3 Kg
2	KUBE Brumbungan II	Jln. Jagalan Selatan 68	10 orang	19 Oktober 2018	LPG 3 Kg
3	KUBE Brumbungan III	Jln. Pringgadi ng III/15	10 orang	19 Oktober 2018	LPG 3 Kg
4	KUBE Brumbungan IV	Jln. Brumbung an gg.II/4	10 orang	19 Oktober 2018	LPG 3 Kg
5	KUBE Brumbungan V	Jln. Karangan yar Selatan	10 orang	19 Oktober 2018	LPG 3 Kg

b. KUBE Kelurahan Pandansari

No	Nama KUBE	Lokasi	Jumlah Anggota	Terima Bantuan Pada	Jenis Usaha
1	KUBE Pandansari I	Jln. Pandansari IX/486	10 orang	19 Oktober 2018	LPG 3 Kg
2	KUBE Pandansari II	Jln. Pandansari Raya 64 a	10 orang	19 Oktober 2018	LPG 3 Kg

3	KUBE Pandansari III	Jln. Pandansari Raya 53	10 orang	19 Oktober 2018	LPG 3 Kg
4	KUBE Pandansari IV	Jln. Kp Grobogas 41 A	10 orang	19 Oktober 2018	LPG 3 Kg
5	KUBE Pandansari V	Jln. Pandansari III/616	10 orang	19 Oktober 2018	LPG 3 Kg

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Bapak Sholikin (TKSK) di Kantor Kecamatan Semarang Tengah / Ruang TKSK



Wawancara dengan Ibu Kasih (KPM Sembako) di Rumah Ibu Kasih



Wawancara dengan Bapak Muajianto (Ketua KUBE) di Rumah Bapak Mujianto



Wawancara dengan Ibu Erna (Anggota Kube + agen E-Warung penyaluran Bansos Sembako) di Rumah Ibu Erna



Kegiatan Penyaluran Bansos Sembako di Dampingi oleh TKSK Langsung di lapangan (Agen)



Kegiatan Rapat Rutin Bulanan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Dampingi oleh TKSK



Foto E-Warung beserta KUBE



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sholikin, SE., S. Pd
Alamat : Kp. Grobogan No. 48 Rt.3 Rw.3 Kelurahan Pandansari
Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang
Jabatan : TKSK Semarang Tengah / Koordinator TKSK Kota Smg.

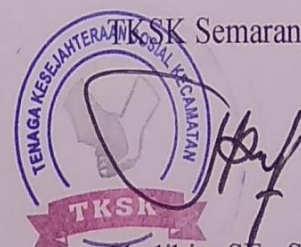
Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : Syukron Makmun
Nim : 1601046065
Jurusan/Fakultas : Pengembangan Masyarakat Islam/Dakwah dan Komunikasi
Institusi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah benar-benar melaksanakan penelitian di (TKSK) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada tanggal 2 Oktober 2019 sampai 20 Juli 2020 dengan judul skripsi “Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang”

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 29 Juli 2020

TKSK Semarang Tengah

Sholikin, SE., S. Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Syukron Makmun
2. Nim : 1601046065
3. Tempat Tanggal Lahir : Demak, 03 Agustus 1992
4. Alamat : Ds. Grogol Tempel, Rt/Rw. 05/03,
Kecamatan. Karang Tengah, Kabupaten. Demak
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N Grogol 1 Lulus Tahun 2005
2. Mts N Karang Tengah Demak, Lulus Tahun 2008
3. PKBM (Paket C) Al-Hikmah Guntur Demak, Lulus Tahun 2012
4. MTs Salafiyyah Al-Hidayat Temuroso Guntur Demak, Lulus Tahun 2011
5. MA Salafiyyah Al-Hidayat Temuroso Guntur Demak, Lulus Tahun 2014
6. Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2020

Syukron Makmun
NIM. 1601046065